

**ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PADA INSTITUSI
PENDIDIKAN DI MALAYSIA BERDASARKAN AKTA 550**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana pendidikan



Oleh:

Ari Cahyanti

15422111

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PADA INSTITUSI
PENDIDIKAN DI MALAYSIA BERDASARKAN AKTA 550**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana pendidikan



Oleh:

Ari Cahyanti

15422111

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ari Cahyanti
No. Mahasiswa : 15422111
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Studi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pendidikan Islam Pada Institusi Pendidikan Di Malaysia Berdasarkan Akta 550

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali di acuan dalam penulisan dan di cantumkan dalam daftar Pustaka. Apabila ternyata dio kemudian hari penulisan skripsi ini merupakanj hasil plagiat atau penjiplakam terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, Jum'at 5 Februari 2021

Yang menyatakan,



Ari Cahyanti

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1442 H
5 Februari 2021 M

Hal : Skripsi

Kepada. : Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1582/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 M atau bertepatan pada tanggal 25 Safar 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Ari Cahyanti

NIM : 15422111

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Jurusan : Studi Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

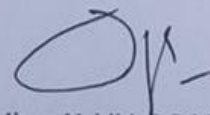
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pendidikan Islam Pada Institusi Pendidikan Di
Malaysia Berdasarkan Akta 550

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wrb

Dosen Pembimbing



Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I., M.Pd.I

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Ari Cahyanti

Nomo Mahasiswa : 15422111

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pendidikan Islam Pada Institusi

Pendidikan di Malaysia Berdasarkan Akta 550

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yogyakarta, Jum'at 5 Februari 2021


Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I., M.Pd.I

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Februari 2021
Nama : ARI CAHYANTI
Nomor Mahasiswa : 15422111
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pendidikan Islam pada Institusi Pendidikan di Malaysia Berdasarkan Akta 550

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag

Penguji I

Supriyanto Abdi, S.Ag, MCAA

Penguji II

Ahmad Zubaidi, S.Pd., M.Pd.

Pembimbing

Moh. Mizan Habibi, M.Pd.I

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 26 Februari 2021
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

MOTTO

“Sistem Pendidikan Yang Bijaksana Setidaknya Akan Mengajarakan Kita Betapa Sedikitnya Yang Belum Diketahui Oleh Manusia, Seberapa Banyak Yang Masih

Harus Ia Pelajari”

- Sir John Lubbock -



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk Almamaterku tercinta

“Universitas Islam Indonesia”

Kepada yang tercinta

Kedua orangtaku, Bapak Sugianto dan Ibu Yam Sasmi

Adik ku yang ku cintai Muhammad Amin Al Husain

Sahabat, dan teman seperjuangan PAI/FIAI/UII

untuk para Pendidik bangsa

Dan yg terakhir untuk Para pembaca yang Budiman



ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PADA INSTITUSI PENDIDIKAN DI MALAYSIA BERDASARKAN AKTA 550

Oleh:

Ari Cahyanti

Kekuatan pemerintah Malaysia dalam mengintervensi kegiatan pendidikan agama Islam bisa menjadi superioritas, karena pemerintah Malaysia menciptakan kesenjangan antara agama Islam dengan agama lainnya lewat Akta 550 ini, maka hal ini menjadi penting bagi penulis untuk melanjutkan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai referensi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah pemikiran para ahli pendidikan Islam dan sejarah pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mana bahan pustaka dijadikan sebagai sumber data. Untuk menemukan data yang penting dalam penulisan di atas maka sangat diperlukan data yang dihimpun dari akta 550 pendidikan 1996 Malaysia. Dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku, majalah, artikel, dan jurnal institusi pendidikan di Malaysia, serta mengumpulkan berkas-berkas pendukung yang berkaitan dengan penerapan pendidikan Islam di Malaysia. ada 2 tahapan analisis data ini yaitu : menjelaskan data dan menarik kesimpulan.

Keyword: Sistem Pendidikan, Institusi Pendidikan, Akta 550

ABSTRACT

ANALYSIS OF ISLAMIC EDUCATION SYSTEMS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN MALAYSIA BASED ON AKTA 550

By:

Ari Cahyanti

The power of the Malaysian government in intervening Islamic religious education activities can be a superiority, because the Malaysian government creates a gap between Islam and other religions through this Akta 550, so it is important for the author to continue this research. The purpose of this study is as a reference for the development of Islamic education in Indonesia. The subject of this research is the thoughts of Islamic education experts and the history of Islamic education. This research is a research library (library research) in which library materials are used as a data source. In order to find important data in the writing above, it is very necessary to compile data from the Akta 550 Malaysian Education Law. By searching and collecting data from books, magazines, articles, and journals of educational institutions in Malaysia, as well as collecting supporting files related to the implementation of Islamic education in Malaysia. There are 2 stages of this data analysis, namely: explaining the data and drawing conclusions.

Keyword: Educational System, Educational Institution, Akta 550

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Penyayang diantara penyayang, yang menanamkan cinta dan kasih sayang-Nya kepada seluruh hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Shalawat serta salam tetap terukir indah kepada Nabiullah tercinta, Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Begitu pula kepada keluarga, sahabat-sahabanya serta umatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari pembalasan.

Sungguh suatu karunia besar yang telah Allah titipkan. Kendala, ujian, cobaan tak menyurutkan penulis pada kehendak Tuhan. Bila kita telah berusaha dan berdo'a, Allah pasti memberi jalan yang terbaik. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Sistem Pendidikan Islam Pada Institusi Pendidikan Di Malaysia Berdasarkan Akta 550". Do'a dan dorongan dari berbagai pihak banyak memberikan kontribusi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M. Sc.,Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Siti Afifah Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd, selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I., M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dengan tulus dan sabar. Dengan penuh perhatian selalu memberikan motivasi, ilmu, do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu kedua penulis ketika di kampus, selaku dosen program Pendidikan Agama Islam, kepada Bapak (Dr. Hujair AH Sanaky, M.SI., Drs H. Muzhoffar Akhwan, MA., Drs. Aden Wijdan SZ, M.SI., Drs. H. AF Djunaidi, M.Ag., Dr. Supriyanto Pasir, S.Ag., Drs. H. Imam Mudjiono, M.Ag., Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd., Lukman, S.Ag, M.Pd., Supriyanto, S.Ag, M.CAA., Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd, Edi Safitri, S.Ag, M.Ag., Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I, M.Pd.I., Burhan Nudin, S.Pd.I, M.Pd.I.) dan kepada Ibu (Dr. Junanah, MIS, Dra. Hj. Sri Haningsih, M.Ag., Siska Sulistyorini, S.Pd.I, M.S.I, Mir'atun Nur Arifah, S.Pd.I., M.Pd.I, Siti Afifah Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd) semoga Allah selalu memberi keberokahan umur, rezeki, ilmu dan nikmat dalam iman Islam.
7. Terimakasih yang teramat sangat kepada kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing, dan menyayangi saya, Bapak Sugianto dan Ibu Yam Sasmi, Terima kasih untuk perjuangan bapak dan ibu selama ini.

8. Saudaraku tercinta Muhammad Amin Al Husain, Shalahuddin Ahmad Al Muqorrobin, Rusdi Kadir yang selalu memberi semangat dengan caranya.
9. Datok dan nenek saya yang berada di Kalimantan Barat yang selalu memberikan doa dan dukungan agar selalu semangat dalam menuntut ilmu dan mengejar cita-cita.
10. Guru ngaji saya almrh Nek Long Jam dan Tok Mansyur yang sangat berjasa dalam membimbing dan mengajari saya ilmu agama, dan mengaji dan pelajaran hidup.
11. Keluarga saya di Yogyakarta yang turut membantu saya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia baik berupa materi dan dukungan agar selalu segera menyelesaikan pendidikan dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi terima kasih sekali lagi untuk keluargaku di Yogyakarta Pakde Soekarno, Pakde Sukarjo, Pakde Suroto, Pakde Sukirman, Dan Lek Sri Wasilah, Siti Puji Lestari, Sidik Wahyudi, Catur Amrih, dan seluruh keluargaku yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Sahabatku tercinta Zahrotun Nisa, Ratih Tyas Pratiwi, Aura Rahmi Ramadana, Nicky Hardita, Ismi Shifatillah, Diar Melati Suhud, Nada Hanita, Nursyifa Pratiwi, Marta Sulistyaningsih, Novi Clara, Hanifa, Qisthi Karami, Nevi Indriani.
13. Kakak-Kakak saya yang selalu menjadi inspirasi saya selama menempuh pendidikan di Yogyakarta Dwi Okta Jelita, Nabilla Nuri, Inayah Nurtriani.

14. Adik-adik saya yang selalu saya sayangi yang selalu menguji kesabaran saya, dan tak pernah lelah mengingatkan saya untuk terus menyelesaikan tugas akhir saya Adinda Prameswari dan Amikasia Thalia Nalora.
15. Teman-teman DPM Universitas Islam Indonesia Dimas Rusyadi, Bagas Wahyu Nursanto, Akbar Rahmat Putra yang selalu sabar dan senantiasa membimbing saya selama masa kepengurusan di Dewan Permusyawaratan Mahasiswa.
16. Teman-Teman Magang Trial Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang telah memberikan dan mengajarkan berbagai hal ketika saya baru pertama kali belajar Organisasi di Universitas Islam Indonesia.
17. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam terima kasih telah menjadi organisasi terbaik yang pernah saya miliki, yang telah memberikan wadah untuk saya terus berkembang dan membuka mata saya bahwa kita harus terus belajar tentang banyak hal.
18. Teman-Teman pengurus HMI cabang Periode 2019/2020 yang telah banyak memberikan pengalaman yang sangat berharga yang tidak akan saya dapatkan ditempat lain selama kepengurusan, yang selalu memberikan energi positif untuk terus berkembang dibawah kepemimpinan imam Cabang Yoyakarta Rahmatsyah beserta jajarannya dan seluruh pengurus cabang Hmi Yogyakarta.
19. Teman-teman KKN unit 39 desa jeruk selo Nicky Hardita, Mediantari Oktavianti, Yogi Kusuma Wijaya, Dwi Muryanto, Oniel, Haryo Dan Herfino

yang telah memberikan pengalaman berkesan dan membantu menyelesaikan tugas KKN.

20. Teman-teman PPL MTsN 6 Sleman Nabella Faizla, Bella Reziana, Hana Rosinta, Aulia, Mungin, Dimas Aprilian, Hafiz, Dipo, Dan Faturrahman Alias Keriting terima kasih banyak atas kerjasama selama 2 bulan ppl dan membantu menyelesaikan tugas-tugas ppl.
21. Teman-teman seperjuangan PAI angkatan 2015 yang telah berjuang bersama selama ini.
22. Terimakasih juga kepada anak-anak didikku tercinta siswa/i MTs N 6 Sleman Yogyakarta. Terutama Kelas VII.
23. Teman-teman pengajian Rumah Warna yang telah banyak mengajarkan untuk selalu taat, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt dan selalu berada di jalan yang lurus dan tak lupa teman-teman Muslim United.
24. Dan terimakasih banyak atas semua pihak, mohon maaf dengan kerendahan hati atas keterbatasannya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberi semangat, mendoakan, mengenal dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

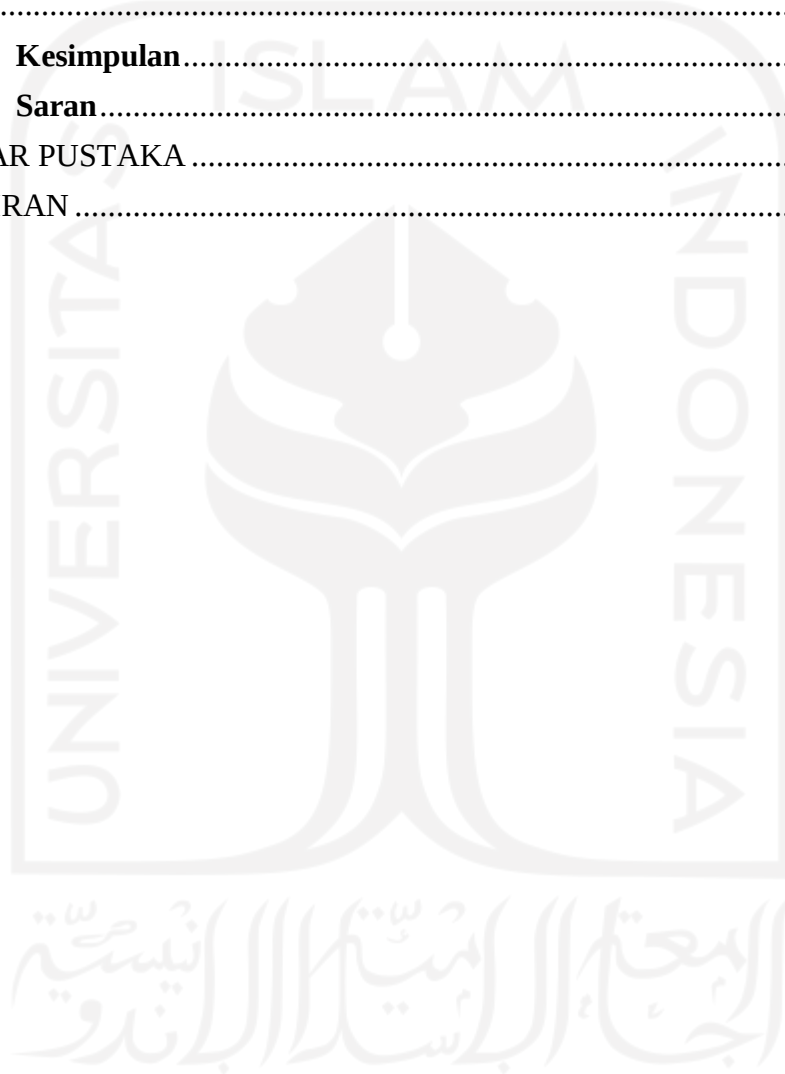
Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoan, kasih sayang, nikmat iman dan Islam serta petunjuk-Nya kepada kita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori	17
1. Pendidikan	17
2. Pendidikan Islam	19
3. Institusi Pendidikan	21
4. Sistem Pendidikan	22
BAB III	26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	26
B. Sumber Data	26
C. Seleksi Sumber	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV	29
A. Sejarah Institusi Pendidikan di Malaysia	29
1. Fase Pra Kolonial Inggris	34

2. Fase Kolonial Inggris	35
B. Geografi dan Demografi Malaysia.....	40
C. Guru dan Jenjang Pendidikan di Malaysia.....	42
D. Akta 550 Tahun 1996.	46
E. Penerapan Pendidikan Islam Dalam Akta 550.	51
BAB V.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaysia adalah suatu negara yang secara geografis masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Sebagai negara yang didominasi ras Melayu, Malaysia memiliki berbagai ragam agama yang dipeluk warganya. Islam, Kristen, Hindu, Budha adalah di antara agama yang menjadi keyakinan mereka. Dalam perkembangan agama Islam, Malaysia memiliki nuansa yang lebih baik, terutama dalam sisi formal legal, dibandingkan dengan negara-negara di sekitarnya. Sebab dalam Konstitusi Malaysia, Islam telah dijadikan agama resmi bagi negaranya. Padahal komunitas Muslim diperkirakan hanya menempati perbandingan presentase yg lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim. Hal ini kiranya lebih disebabkan bahwa bangunan landasan negara, Malaysia memiliki dasar yang kuat dalam mengimplementasikan ajaran Islam ke depan, sehingga grafik perkembangan Islam semakin meningkat.

Diantara negara-negara di Dunia tidak banyak yang menjadikan agama sebagai kesatuan dalam kelembagaan pemerintah, di Malaysia kekuatan agama dalam kebijakan pemerintahan menjadi sangat penting selain mayoritas penduduknya. Stackholder dalam kelembagaan pemerintah begitu taat dalam melaksanakan perintah Agama. Hal ini sudah menjadi tradisi yang kuat dalam kerajaan yang ada di dataran melayu tersebut.

Tindakan Sultan Muhammad Syah apabila menyambut kedatangan bulan Ramadhan, baginda memuliakan bulan tersebut terutama pada malam Dua Puluh Tujuh disamping menunaikan sembahyang Tarawih di masjid bersama-sama rakyat. Begitu juga sanjungan tinggi yang diberikan pemerintah kepada kitab-kitab agama dan hukum-hukum agama. Salah seorang pemerintah Melaka iaitu Sultan Mansur Syah memberikan penghormatan yang begitu tinggi dan memuliakan Kitab Darul Mazlum¹.

Ketika Malaysia berada di penghujung lahirnya kemerdekaan, maka beberapa persiapan mendasar dilakukan, seperti membuat undang undang dasar Malaysia. Pada awalnya, rancangan Konstitusi Malaysia tidak menyebutkan agama resmi, Tetapi langkah ini didukung oleh penguasa sembilan negara Melayu, yang merasa cukup bahwa Islam adalah agama resmi masing-masing negara bagian. Kemudian, Hakim Abdul Hamid yang merancang konstitusi mengeluarkan argumen yang kuat untuk menjadikan Islam sebagai agama resmi, dan sebagai hasilnya, konstitusi terakhir menyebutkan Islam sebagai agama resmi Malaysia. Semua etnis Melayu beragama Islam, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 160 Konstitusi Malaysia².

Malaysia merupakan sebuah negara yang berasaskan kepada system kenegaraan Melayu atau “Malay Polity” sehingga Malaysia lebih dikenal sebagai

¹ Abdullah Ishak (1995). Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 127.

² Abdul Rohman, Perkembangan Islam dan Gerakan Politiknya di Malaysia, Jurnal Politik Walisongo – Vol 2, No 1 (2020), h 33.

Tanah Melayu.³ Malaysia pernah dijajah oleh Portugis (1511 M-1641 M), Belanda (1641 M-1786 M), Inggris (1786 M-1957 M), Jepang.⁴ Perjuangan rakyat Malaysia untuk merebut kembali negaranya yang telah dijajah dimulai pada tahun 1940-an dan 1950-an.⁵ Kaum penjajah dari bangsa Inggris yang menjajah Malaysia, bukan hanya mendatangkan etnisnya saja, tetapi berbagai macam etnis, seperti Cina dan India sehingga jumlah etnis dari luar yang datang ke negara Malaysia melebihi jumlah penduduk Melayu di Malaysia pada waktu itu.⁶ Dari beberapa penjajah yang telah menjajah Malaysia, disatu sisi bertujuan untuk mengambil kekayaan yang ada di Malaysia, tetapi disisi lain membawa paham agama atau pendidikan yang berbeda-beda. Selain itu juga, negara yang pernah menjajah Malaysia, tetapi berubah menjadi membantu Malaysia dari penjajah lainnya tersebut, yakni kaum Inggris.

Pendidikan Islam kemudian terus berkembang ketika Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. Perkara ini dapat dilihat kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam perundangan dan syor kerajaan dalam perkara berkaitan. Sebagai contoh, di dalam Ordinan Pelajaran 1957 tidak menetapkan kuasa pihak yang menguruskan tentang perbelanjaan melaksanakan pelajaran agama Islam menyebabkan pelaksanaan pelajaran agama Islam tidak

³ Abdullah, Mohd Ridhuan Tee. 2010. "Cabaran Integrasi Antara Kaum Di Malaysia: Perspektif Sejarah, Keluarga Dan Pendidikan (The Challenges of MultiRacial Integration in Malaysia: Historical, Family and Education Perspective)." Jurnal Hadhari: An International Journal 2 (1), hlm. 62.

⁴ Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman. 2011. "Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia." Jurnal At-Ta'dib 6 (1): 65.

⁵ Mahayana, Maman S. 2001. Akar Melayu: sistem sastra & konflik ideology di Indonesia & Malaysia. Magelang: IndonesiaTera. Hlm. 16.

⁶ Abdullah, Mohd Ridhuan Tee. 2010. "Cabaran Integrasi Antara Kaum Di Malaysia, hlm. 62-63.

berjalan dengan sistematik. Jadi di dalam Syor Penyata Abdul Rahman Talib 1960, perkara berkaitan perbelanjaan dinyatakan secara terperinci iaitu segala perbelanjaan berkaitan pelajaran agama Islam ditanggung oleh Kementerian Pelajaran⁷.

Sebelum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diperkenalkan, matapelajaran pendidikan Islam tidak wajib diambil dalam peperiksaan seperti peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) walaupun ianya wajib dipelajari. Pada tahun 1979, Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran telah mengeluarkan satu laporan menyeluruh berkaitan aspek pendidikan negara termasuklah kurikulumnya. Hasil kajian tersebut, KBSR telah digubal dan dilaksanakan secara keseluruhannya pada 1983. Ianya diteruskan diperingkat sekolah menengah pada tahun 1988 iaitu setelah enam tahun KBSR dilaksanakan di sekolah rendah dengan nama Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)⁸.

Pengaruh pemerintah terhadap pendidikan agama Islam di Malaysia dapat ditelusuri melalui akta 550, melalui peraturan ini pendidikan agama Islam menjadi sangat prioritas dibandingkan dengan agama lain seperti yang disebutkan “bantuan keuangan bagi institusi Pendidikan yang tidak diselenggarakan oleh menteri atau kerajaan negeri” sedangkan pengajaran dan subsidi keuangan bagi

⁷ Kementerian Pelajaran Malaysia (1972), Laporan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Terhadap Pelajaran Agama Islam Mengikut Syor2 Penyata Razak 1965, dan Jawatankuasa Menyemak Pelajaran 1960. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 5.

⁸ Kementerian Pelajaran Malaysia (1992), Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum, h. 1.

agama selain agama Islam cukup terbatas, superioritas lain yang diterima oleh ummat Muslim adalah semua Institusi pendidikan yang memiliki jumlah pelajar minimal 5 orang maka ia berhak untuk mendapatkan pendidikan agama Islam dari guru yang diluluskan oleh negara. Hal tersebut tentu bisa menciptakan kesenjangan antara agama Islam dengan agama lainnya, dan kekuatan pemerintah dalam mengintervensi terhadap kegiatan pendidikan agama Islam bisa menjadi superioritas. Maka hal ini menjadi penting bagi penulis untuk melanjutkan penelitian ini.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada penerapan pendidikan Islam yang ada di institusi pendidikan di Malaysia sesuai undang-undang Malaysia Akta Pendidikan 550.

2. Pertanyaan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas terdapat pertanyaan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pendidikan Islam di Malaysia berdasarkan isi Akta 550 Malaysia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai referensi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk seluruh institusi pendidikan terutama untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, agar kualitas pendidikan Islam di Indonesia meningkat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada semua aspek pendidikan Islam yang telah ada.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami isi proposal skripsi maka peneliti sajikan kerangka sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan.

BAB II. Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Terdapat subbab Kajian Pustaka yang berisi banyak informasi mengenai penelitian ini, menyangkut beberapa pendapat dari beberapa tokoh yang berkaitan dengan skripsi, jurnal, tesis, hasil riset maupun artikel, dan juga terdapat subbab Landasan Teori.

BAB III. Metode Penelitian. Membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan. Merupakan penyampaian data dan hasil penelitian skripsi. Ini merupakan point terpenting dalam penelitian skripsi ini, karena pada bab ini memaparkan hasil dan pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti.

BAB V. Kesimpulan. Yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisi tentang jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti agar kedepannya lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian ini, tentunya peneliti telah mencari beberapa penelitian terdahulu yang temanya bersinggungan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Khususnya penelitian yang berkaitan dengan Analisis Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia. Adapun beberapa penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, September 2015 yang berjudul “Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia” yang di tulis oleh Budi Haryanto. Dalam jurnal ini membahas dan menelaah kesamaan juga perbedaan dinamika perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia guna memberikan pemahaman yang lengkap tentang aktualisasi pendidikan Islam sejak penyebaran pertama hingga pengembangannya di negara masing-masing.

Perbedaan dengan jurnal tersebut adalah penulis membahas bentuk pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman melalui pendidikan Islam, dan juga bagaimana sejarah perkembangan pendidikan Islam di Malaysia bisa mempengaruhi kualitas pendidikan Islam di Malaysia menjadi lebih baik⁹.

⁹ Budi Haryanto, “Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, (September, 2015).

2. Penelitian Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 18, No. 1, Juni 2015 yang berjudul “Pendidikan Islam di Malaysia: Jenis, Jenjang, Kebijakan, dan Tujuan Pendidikan” yang di tulis oleh Andi Aslindah. Dalam jurnal ini membahas perkembangan pendidikan Islam di Malaysia, apa saja jenis-jenis dan tingkatan-tingkatan pendidikan, dan apa saja kebijakan pendidikan yang ada di Malaysia.

Perbedaan dengan jurnal tersebut, penulis menyajikan bagaimana model sistem pendidikan Islam di Malaysia agar bisa diterapkan di sistem pendidikan yang ada di Indonesia¹⁰.

3. Skripsi atas nama Hanif Masykur mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga 2015 berjudul “Eksistensi dan Fungsi Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional” yang berisi tentang bagaimana eksistensi dan fungsi Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan Nasional antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2014.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas lebih general bagaimana eksistensi dan fungsi Pendidikan Agama Islam dari sebelum sejak sebelum penjajahan hingga sekarang yang dipadukan dengan sejarah pendidikan Islam yang ada di Malaysia sehingga dapat mempengaruhi pendidikan Islam di Indonesia¹¹.

¹⁰ Andi Aslindah, “Pendidikan Islam di Malaysia”, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 18, No. 1, (Juni, 2015).

¹¹ Hanif Masykur, “Eksistensi dan Fungsi Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional”, *Penelitian Tugas Akhir*, (2015).

4. Skripsi atas nama Rizky Afrie mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 2014 berjudul “Sistem Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas (Kajian Kitab al-Fikru at-Tarbawiyya ‘Inda Ibni Qayyim alJauziyah Karya Hasan bin Ali al-Hijazy)” yang berisi tentang kontribusi atau rujukan pendidikan Islam untuk Memperkaya wawasan keilmuan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernitas.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah penulis membahas bagaimana model pendidikan Islam di Malaysia dengan tantangan modernitasnya dapat dijadikan sumber rujukan pendidikan Islam di Indonesia yang bertujuan supaya dapat menciptakan manusia yang berorientasi kepada Allah melalui tantangan Modernitas¹².

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh zaitun berasal dari UIN Suska Riau memeberikan gambaran tentang Pendidikan Islam di Malaysia dengan judul “Pendidikan Islam Di Malaysia” Sebagai salah satu dari Tenggara Negara Asia Malaysia menganut sistem parlementer. Dimana kekuasaan dipegang oleh perdana menteri. Sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai agama resminya Jelas terlihat campur tangan pemerintah dalam kelangsungan hidup Islam di Malaysia ini cukup maju dan dikenali dengan cepat.

¹² Rizky Afrie, “Sistem Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas (Kajian Kitab al-Fikru at-Tarbawiyya ‘Inda Ibni Qayyim alJauziyah Karya Hasan bin Ali al-Hijazy)”, *Penelitian Tugas Akhir*, (2015).

Perbedaan dengan artikel tersebut adalah pembahasan dalam penelitian ini memfokuskan kepada Undang-undang Malaysia Akta 550¹³.

6. Penelitian Jimaain Safar, Ahmad Marzuki Muhammad, Wan Hassan Wan Embong yang berjudul “Pendidikan Akhlak Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia Sebagai Asas Kecemerlangan Pencapaian Sains dan Teknologi”. Penelitian yang berbentuk artikel jurnal ini mencoba untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan tersebut masuk Malaysia mengutamakan perkembangan moral serta menghasilkan manusia berpengetahuan dan berpengetahuan luas. Didalamnya juga membahas kurikulum pendidikan moral disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari sekolah dasar hingga sekolah sekunder. Dibahas pula terkait masalah pendidikan moral dan sains yang terjadi dalam sistem pendidikan di Malaysia.

Penelitian ini menggambarkan perkembangan system pendidikan moral di Malaysia, juga membahas mengenai peran kementerian pendidikan terhadap sekola dasar, perbedaan dari skripsi dan penelitian adalah jurnal ini tidak berfokus pada pendidikan Islam, serta dasar analisisnya bukan pada akta 550 sehingga lebih luas¹⁴.

7. Jurnal yang berjudul “Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia”. Sejarah kurikulum di Malaysia tidak terlepas dari politik yang menaunginya, yang mana peran penting dalam perubahan kurikulumnya

¹³ Zaitun, *Pendidikan Islam Di Malaysia*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni (2011).

¹⁴ Jimaain Safar, dkk, “Pendidikan Akhlak Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia Sebagai Asas Kecemerlangan Pencapaian Sains dan Teknologi”, *jurnal Ajmain vol 2 no 1*, Universiti Teknologi Malaysia, 2014. Malaysia

adalah berawal dari sistem pemerintahan. Hasil temuan penelitian dari sejarah pendidikan di Malaysia; Pertama, Malaysia yang dikenal sebagai sistem kerajaan, dan raja yang pertama menganut agama Islam sehingga mempengaruhi pendidikan bagi rakyatnya. Kedua, sejak kaum penjajah yang datang di Malaysia, maka sistem pendidikan mengalami dualisme, antara sistem pendidikan Ulama dan sistem pendidikan ala barat yang dibawa oleh kaum penjajah, yang mana peran penting dari kaum penjajah tersebut adalah Inggris. Ketiga, perubahan kurikulum di Malaysia, sejak telah dijajah dan mengalami kemerdekaan tidak terlepas dari kurikulum yang orientasinya ke barat. Sementara, mata pelajaran agama mengalami kemunduruan karena beberapa hambatan, misalnya mata pelajaran agama menggunakan huruf jawi yang kurang disenangi oleh siswa-siswi di Malaysia dan pengaruh perkembangan teknologi.

Perbedaan dari skripsi yang akan penulis tulis adalah Penelitian ini menjelaskan sejarah kurikulum pendidikan Islam di Malaysia, berdasarkan kekuatan politik yang terjadi dari masa kemasa, sehingga mempengaruhi terhadap kebijakan pendidikan Islam di Malaysia, namun tidak membahas mengenai akta 550 sebagai landasan kebijakan dalam sejarah kurikulum pendidikan Islam di Malaysia¹⁵.

8. Artikel jurnal yang berjudul “Sistem Pendidikan Baru Malaysia: Suatu Pendekatan Holistik-Komprehensif” yang ditulis oleh Saadon Awang. Dasar Pendidikan Negara telah melahirkan Sistem Pendidikan Malaysia

¹⁵ Aslan, “Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia”, Jurnal TA‘LIMUNA, Vol.8, No. 1, 2019.

yang mengikut acuannya tersendiri. Sistem ini telah mencapai usia melebihi 40 tahun pada hari ini dengan melalui berbagai pindaan dan perubahan mengikut peredaran masa. Usia yang begitu lama bagaimanapun, tidak menjamin Sistem Pendidikan Malaysia muncul sebagai satu sistem yang terunggul. Pengaruh perubahan struktur politik, ekonomi dan sosial dalam dan luar negara telah menyebabkan sistem ini gagal memainkan peranan sebagai institusi yang melahirkan modal insan berkualiti di masa hadapan. Malahan kelemahan sistem pendidikan ini tidak dapat menghalang negara daripada dihinggapi oleh tiga penyakit, iaitu gejala sosial, buta huruf dan pengangguran, di samping wujudnya ketidakadilan sosial akibat pembuatan keputusan yang tidak tepat. Individu yang dihinggapi oleh penyakit-penyakit sosial ini boleh dianggap sebagai 'individu-individu yang tidak berguna' kepada negara. Artikel ini cuba memperkenalkan satu alternatif sistem pendidikan baru yang lebih lengkap, menyeluruh dan berterusan untuk mengelakkan berlakunya tapisan keluar 'individu-individu yang tidak berguna' tadi. Artikel berkonsepkan pengajuan dasar (policy articulation) ini dihasilkan dengan menggunakan kaedah temu bual, kajian perpustakaan, semakan bahan-bahan terbitan beberapa agensi awam kerajaan, dan pernah dibincangkan dalam seminar peringkat kebangsaan untuk mendapat input-input berguna yang berkaitan bagi mengukuhkan penghujahan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah Penelitian ini menjelaskan pembaharuan konsep pendidikan, yaitu dengan

upaya integrase kerjaan, undang-undang atau akta, dan masyarakat. Penelitian ini membicarakan mengenai situasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat kelas bawah, namun penelitian ini berbeda sebab tidak mengerucut pada pendidikan Islam¹⁶.

9. Artikel jurnal yang berjudul “Pembinaan Negara Bangsa Malaysia: Peranan Pendidikan Sejarah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan” yang ditulis oleh Mohamad Rodzi Abd Razak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya mata pelajaran sejarah dan sejarah sebagai mekanisme untuk memperkuat bangsa Malaysia sekaligus berhasil tujuan dari Kebijakan Pendidikan Nasional. Setelah 52 tahun mencapai kemerdekaan, masalah membangun bangsa Malaysia masih dan terlihat akan dilanjutkan. Pertanyaan yang sensitif dan mengancam sentiment masyarakat multi-rasial sedang dihidupkan kembali secara ekstensif individu dan pihak tertentu. Untuk memperjuangkan kepentingan ras masing-masing, masalah yang melibatkan keistimewaan, masalah kedaulatan, dan baik peran maupun kontribusi tidak dimunculkan untuk menunjukkan relevansi itu. Sementara itu, muncul perselisihan tentang silabus subjek Sejarah diajarkan di tingkat sekolah. Masalah ini muncul sebagai akibat dari kegagalan untuk membentuk semangat nasionalisme dan patriotisme yang tepat di antara warga negara Malaysia. Pertanyaannya, mengapa masih terjadi? Bidang pendidikan sebagai sektor harus berperan sebagai agen perubahan tampaknya tidak mampu

¹⁶ Saadon Awang, “Sistem Pendidikan Baru Malaysia: Suatu Pendekatan Holistik-Komprehensif”, *Journal of Governance and Development* 69 Vol.6, 2010.

membangkitkan mentalitas dan persepsi masyarakat multi rasial melawan keinginan untuk membentuk bangsa yang sama. Kendala silabus, kelemahan metode pengajaran dan pembelajaran serta fokus yang berlebihan pada ujian diidentifikasi sebagai penyumbang kelangsungan masalah ini.

Perbedaan dari skripsi yang akan penulis tulis adalah Penelitian ini berfokus pada sejarah bangsa yang ada di negeri jiran tersebut, untuk menemukan kelemahan dan permasalahan mengenai pendidikan namun di balut dalam konsep sejarah. Artikel ini berbeda dengan skripsi penulis yang berfokus pada akta 550 dan perannya terhadap ummat muslim dalam pendidikan Islam¹⁷.

10. Jurnal yang ditulis oleh Alias Mat Saad dkk yang berjudul “Kajian Kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia”, Mengembangkan kurikulum yang sejalan dengan Filsafat Pendidikan Nasional Tujuan akhir kurikulum harus sejalan dengan citra negara. Jadi, kertas studi ini menjelaskan tentang relevansi tujuan dari Kurikulum Pendidikan Islam dengan Politeknik Filsafat Pendidikan Nasional. Desain yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis adalah dokumen Kurikulum Pendidikan Islam Dokumen Filsafat Pendidikan Politeknik dan Nasional. Sebanyak 108 item

¹⁷ Mohamad Rodzi Abd Razak, “Pembinaan Negara Bangsa Malaysia : Peranan Pendidikan Sejarah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan”, Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, Vol 36, 2009.

Ada keterkaitan antara Kurikulum Politeknik Pendidikan Islam dan Filsafat Pendidikan Nasional. Untuk tujuan validitas dan reliabilitas. Temuan menunjukkan adanya keterkaitan antara materi tujuan Politeknik Pendidikan Islam dengan Filsafat Pendidikan Nasional. Ini menunjukkan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik tidak menyimpang dari Filsafat Pendidikan Nasional. Tetapi beberapa rekomendasi dibahas dalam artikel ini sebagai hasil dari temuan studi untuk memastikan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik memenuhi tuntutan saat ini.

Penelitian ini menggunakan akta pendidikan 1996 untuk menemukan relevansinya terhadap tujuan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia dengan pendidikan Nasional, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan kurikulum pendidikan Islam politeknik tidak menyimpang dari filsafat pendidikan Nasional. Sedangkan penulis akan meneliti kebijakan terhadap penerapan pendidikan Islam dalam akta 550 atau akta pendidikan 1996¹⁸.

Artikel-artikel dan bentuk penelitian diatas merupakan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis dalam rangka menemukan dan mencari bentuk penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian penulis yakni penerapan pendidikan Islam yang ada di institusi pendidikan di Malaysia sesuai Undang-Undang Malaysia Akta Pendidikan 550 tahun 1996.

¹⁸ Alias Mat Saad, dkk, "Kajian Kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia", Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education Vol 3 No2, 2017.

Berbagai penelitian diatas menggambarkan latar belakang berkembangnya Pendidikan Islam di Malaysia, sistem Pendidikan Islam dalam institusi Pendidikan, hingga penerapan Pendidikan Islam, Namun belum ada yang meneliti penerapan Pendidikan Islam yang ditinjau dari akta Pendidikan Malaysia nomor 550 tahun 1996, hal ini menurut peneliti perlu dilakukan kajian mendalam untuk menemukan dorongan normative atau kebijakan yang dibuat oleh penguasa terhadap institusi Pendidikan di Malaysia demi perkembangan Pendidikan Islam.

B. Landasan Teori

1. Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dalam bahasa Yunani, pendidikan memiliki arti yakni kata “pedagogia” yaitu ilmu menuntun anak. Pendidikan dalam Bahasa Inggris adalah “educate”, kata educate sendiri bermakna pemberian intelektual, moral, dan instruksi social agar melatih atau memberi informasi kepada subjek tertentu¹⁹. Dan dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti pengolahan, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Definisi pendidikan menurut para ahli memiliki definisi yang berbeda-beda tapi memiliki point yang sama yaitu upaya menambah wawasan.

¹⁹ Suryapermana, Nana dan Imroatun, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Banten: FTK Banten Press, 2017), hal. 4.

Menurut John Dewey dalam bukunya²⁰, Pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman, dan menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Tetapi menurut Ki. Hadjar Dewantara²¹, Pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya, tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak maksudnya pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Disisi lain, Menurut Poerbakawatja Harahap pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sengaja dari orang tua yang dimaknai mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya²². Adapun menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional²³, pengertian pendidikan adalah “suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

²⁰ Jhon Dewey, *Democracy and Education*, (Pennsylvania State University, 2001), hal. 81.

²¹ Dewantara, Ki Hadjar, *Karja I: Pendidikan*, (Pertjetakan Taman Siswa, 1962), hal. 14-15.

²² Muhibbin, syah, *Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru*, (Bandung. Pt. remaja rosdakarya, 2007) Hal. 11.

²³ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara teratur dan sistematis untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia, baik jasmani dan rohani dalam tingkatan-tingkatan kognitif, afektif dan psikomotor sehingga berwujud perubahan perilaku (behaviour) manusia dan berkarakter kepribadian bangsa. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) menyerukan kepada seluruh negara-negara di dunia bahwa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan bangsanya, maka haruslah dimulai dari pendidikan, karena pendidikan menjadi kunci menuju perbaikan peradaban. UNESCO di Asia Pasifik memperlihatkan bagaimana pendidikan memerankan diri dalam pembangunan dan masyarakat melalui beragam pendekatan²⁴.

Mengacu pada definisi pendidikan berarti adalah usaha terus menerus manusia sejak lahir hingga mati untuk menuju dari posisi “tidak tahu” ke posisi “tahu” seperti yang digambarkan dalam surat An Nahl ayat 78.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”²⁵.

2. Pendidikan Islam

Pada dasarnya makna Pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan serta pengembangan potensi akal, perasaan, kehendak, dan rohani lainnya

²⁴ UNESCO and education: everyone has the right to education, (School children in Florida, Colombia, 2011), hal. 10.

²⁵ QS An-Nahl: 78

yang ada didalam diri manusia, tujuannya agar kehadiran manusia di dunia ini sebagai hamba Allah juga khalifah Allah tercapai di dunia ini sebaik mungkin. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

“ Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai Khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu diatas yang lain ”²⁶.

Menurut salah satu tokoh Islam yaitu Al-Ghazali, pendidikan Islam memiliki konsep upaya mentransformasikan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan Al-qur'an dan As-sunnah sebagai acuan dasar upaya tersebut²⁷. Disisi lain, salah satu tokoh Islam Ibnu Khaldun juga mendefinisikan makna pendidikan Islam, pendidikan Islam merupakan konsep ajaran untuk seluruh aspek kehidupan manusia di semesta ini karena konsep dasar ajaran tersebut menggunakan ajaran Al-qur'an dan As-sunnah²⁸.

Pengertian lain pendidikan Islam menurut Ahmad Fauzi Abdul Hamid dalam bukunya menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah penyampaian ilmu keIslaman sehingga penerimanya dibekali secara spiritual, intelektual, dan fisik untuk menjalankan peran kembarannya yang ditetapkan Tuhan, sebagai hamba dan wakil-Nya di muka bumi²⁹.

²⁶ Qs Al-an'am: 165

²⁷ Ary Antony Putra, "Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazali", *Jurnal Al-Thariqah*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2016), hal. 50.

²⁸ Siti Rohma, "Relevansi Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun", *Forum Tarbiyah*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2012), Hal. 4.

²⁹ Hamid, Ahmad Fauzi Abdul, *Islamic Education in Malaysia*, (Singapore, S. Rajaratnam School of International Studies, 2010), Hal. 7.

Pendidikan dalam agama Islam merupakan bagian dari dakwah yang diungkap di Alquran. Karena pendidikan memberi suatu model pembentukan kepribadian seorang manusia untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Konsep sasaran yang hendak dicapai dalam pendidikan Islam adalah terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia, mempunyai ilmu yang tinggi serta pribadi yang taat beribadah. Istilah pendidikan dalam Islam pada dasarnya mengacu kepada term al-tarbiyah, al-ta'lim dan al-ta'dib. Dari ketiga istilah tersebut term yang sering digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term al-tarbiyah. Sedangkan term al-ta'dib dan al-ta'lim jarang digunakan.

Kata al-Tarbiyah dalam bahasa Arab adalah Rabba, yarbu (رَبَّ - يَرْبُو) yang memiliki makna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh dan menjadi dewasa. Artinya, pendidikan (tarbiyah) merupakan upaya untuk menumbuhkan dan juga mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual.

3. Institusi Pendidikan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) makna institusi adalah lembaga/pranata; sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal-bihalal pada hari Lebaran); gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi.

Ostrom mengatakan bahwa institusi merupakan aturan dan rambu-rambu yang digunakan sebagai panduan bagi para anggota suatu kelompok

masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung diantara mereka³⁰.

Pengertian institusi yang paling sering menjadi acuan adalah definisi yang dikemukakan oleh Douglas C. North. Ahli tersebut mendefinisikan institusi sebagai aturan-aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan formal, aturan-aturan informal, dan proses penegakan aturan tersebut (*enforcement*)³¹.

Sementara Acemoglou mendefinisikan institusi sebagai seperangkat aturan main yang diperlukan di dalam setiap interaksi ekonomi, politik, dan sosial. Acemoglou juga menyatakan bahwa institusi merupakan wadah atau lingkungan di mana organisasi-organisasi hidup³².

Disisi lain institusi pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Institusi Pendidikan juga dapat diartikan dengan wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses kebudayaan³³.

³⁰ Ostrom, E., (1986), "An Agenda for the Study of Institutions", Public Choice, vol. 48, issue 1, hal 5.

³¹ North, D.C., (1991), "Institutions", Journal of Economic Perspective, vol 5 (1), p. 100.

³² Acemoglou, D., Johnson, S., and Robinson, J.A., (2005), "Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth", Handbook of Economic Growth, volume 1, chapter 6, hal 25.

³³ Enung K Rukia, "SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA", Bandung : Pustaka setia , 2006. Hal 45.

Menurut Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati, Institusi Pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik³⁴. Jadi institusi pendidikan dapat diartikan suatu orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan.

4. Sistem Pendidikan

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti “sehimpunan bagian” atau “komponen”, maksudnya adalah kumpulan bagian atau komponen yang secara teratur saling berhubungan dan merupakan suatu keseluruhan³⁵. Zahara Idris dalam bukunya mengemukakan bahwa sistem memiliki makna kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen atau unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional teratur, tidak acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk)³⁶. Sistem juga dapat diartikan sebagai himpunan atau perpaduan suatu hal atau suatu bagian, membentuk kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh³⁷. Disisi lain, menurut Railwan Nasir dalam bukunya menjelaskan bahwa makna sistem adalah sebuah kumpulan berbagai komponen yang berinteraksi satu dengan lainnya membentuk suatu kesatuan dan memiliki suatu tujuan yang jelas³⁸.

³⁴ Abu Ahmadi, Haji, Nur Uhbiyati, “Ilmu pendidikan”, Jakarta : Rineka Cipta, 1991. Hal 30.

³⁵ Moh Arif Andrian, “Sistem Pendidikan”, *Conference: Filsafat Pendidikan, Malang*, (Mei 2016), hal. 2.

³⁶ Zahara, Idris, *Dasar-dasar Kependidikan 1*, (Padang, Angkasa Raya, 1987), Hal. 13.

³⁷ Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta, CV Rajawali, 1994), Hal. 20.

³⁸ Nasir, Railwan, *Mengantar Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Jogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hal. 27.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk sebuah totalitas, atau makna lain nya sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. Jika makna sistem dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam maka sistem pendidikan Islam adalah seperangkat unsur atau komponen yang terdapat dalam pendidikan, berorientasi pada ajaran Islam yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam mencapai satu tujuan. Sistem Pendidikan Islam merupakan cara dan langkah yang tersusun dengan unsur berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam.

Beberapa definisi sistem yang dekat dengan dunia pendidikan adalah:

- a. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya³⁹.
- b. Sistem adalah kumpulan komponen yang berinteraksi satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan dengan tujuan jelas⁴⁰.
- c. Sistem merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu di mana dalam penggunaannya bergantung pada berbagai faktor yang erat hubungannya dengan usaha pencapaian tujuan tersebut⁴¹.

Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa makna Sistem Pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-

³⁹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hal 69.

⁴⁰ Purwadarminta, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal 955.

⁴¹ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam (Islam dan Umum)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993,hal 245.

unsur pendidikan yang bekerjasama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama pelakunya⁴².

Dalam memahami suatu sistem pendidikan dapat dilihat dari 3 komponen pokok sistem, yaitu: masukan, proses, dan hasil, atau: “*input*”- “*process*”- “*output*”. Masukan berisi: nilai-nilai, kehendak, pendapat-pendapat, dan unsur-unsur. Proses berisi, gerak atau interaksi antara unsur-unsur, dalam perjalanan mengolah masukan menuju hasil. Perilaku aktor dalam berinteraksi dan memanipulasi unsur-unsur atau masukan-masukan lainnya dijiwai oleh nilai yang dikandung dalam sistem yang bersangkutan. *Output* berisi hasil-hasil yang dicapai oleh sistem⁴³. Sedangkan hasil atau output sangat tergantung pada masukan dan proses, yaitu instansi sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

⁴² Mastuhu, “Dinamika sistem pendidikan pesantren : suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren / Mastuhu”, Jakarta Indonesia Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1994, hal 26.

⁴³ Rusadi Kantaprawira, Aplikasi Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta: Bunda Karya, 1987, 21.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan penelaahan terhadap buku-buku, majalah, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, terutama masalah pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lainnya yang berhubungan.⁴⁴

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴⁵

B. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana bahan pustaka dijadikan sebagai sumber data. Untuk menemukan data yang penting dalam penulisan diatas maka sangat diperlukan data yang dihimpun dari akta 550 pendidikan 1996 Malaysia.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder dalam hal ini memuat penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, majalah, jurnal dan atau karya-karya lain yang membahas tentang pendidikan Islam di malaysia. Melalui data ini penulis

⁴⁴ Anton Baker dan Ahmad Chris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63

⁴⁵ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001) hlm. 5

sangat membutuhkan data pendukung dalam penyelesaian yang nantinya menjadi variabel penyempurna dari penelitian.

C. Seleksi Sumber

Subjek penelitian ini adalah pemikiran para ahli pendidikan Islam dan sejarah pendidikan Islam baik melalui sumber primer atau sekunder sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas. Penyeleksian sumber dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang valid. Sumber primer diseleksi dengan mengumpulkan dokumentasi tertulis yang berasal dari website resmi.

Penulis juga berupaya untuk menyajikan data yang shahih dengan mengkonfirmasi data yang diperoleh. Untuk melaksanakan ini, penulis menguji kredibilitas data dengan mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan bandingan⁴⁶. Disini peneliti menggunakan lebih dari satu sumber primer guna membandingkan dan mendapatkan data yang shahih.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) maka dalam memperoleh data yang diperlukan penulis. Dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari data primer yaitu buku, majalah, artikel, dan jurnal institusi pendidikan di Malaysia, serta data sekunder merupakan berkas-berkas pendukung dan berkaitan dengan penerapan pendidikan Islam di Malaysia.

Pengumpulan data akan diikuti dengan bentuk dokumntasi baik berbentuk dokumen akta, website resmi, dan dokumntasi pendukung lainnya.

⁴⁶ Arief Rahman, *Studi Tokoh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm 76.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan diperoleh data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk keterangan-keterangan atau data yang tidak berbentuk angka. Dalam penganalisaan data yang terkumpul, akan digunakan. Menafsirkan serta mengklasifikasikan dan membanding-bandingkan fenomena-fenomena.⁴⁷

Setelah data penelitian telah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapat. Analisis tersebut menguraikan atau memisahkan, maka menganalisis data berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian-pengertian serta kesimpulan-kesimpulan. Oleh karena itu ada dua tahapan analisi data ini yaitu: menjelaskan data dan menarik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1987) hal. 136.

A. Sejarah Institusi Pendidikan di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi yang cukup penting di dunia Islam karena kiprah keIslamannya. Berbagai proses Islamisasi di negeri ini tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi didahului oleh peran pedagang muslim, perjuangan para mubalig, serta penanaman nilai-nilai Islam melalui pendidikan⁴⁸.

Saat ini, Pemerintah Malaysia mengembangkan dua sistem pendidikan yang diadakan untuk warga negaranya. Dua tipe tersebut yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Beberapa pendidikan Islam dilaksanakan dengan sistem pondok pesantren dan ada yang dengan sistem madrasah. Sistem pendidikan tersebut sekarang juga diterapkan di sekolah sekolah umum dan di perguruan tinggi baik institut ataupun universitas. Sistem pendidikan modern dikenalkan dari sumber Barat⁴⁹.

Pada peringkat awal penempatan orang Melayu dan Cina di Kuala Lumpur pada tahun 1850, tidak terdapat sumber sejarah yang menyatakan telah wujud suatu sistem atau institusi pendidikan Islam yang formal di Kuala Lumpur. Catatan sejarah, didapati kepercayaan dan amalan orang Melayu Islam pada ketika itu masih terpengaruh kuat dengan unsur-unsur animisme dan dinamisme. Sebagai contoh, pada awal kedatangan penambang Cina pada tahun 1857 untuk menjelajahi hutan belantara yang bertujuan untuk manambang bijih timah, mereka

⁴⁸ Andi Aslindah, PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA: Jenis, Jenjang, Kebijakan, dan Tujuan Pendidikan, Lentera Pendidikan, Vol. 18 No. 1 Juni 2015, hal 17.

⁴⁹ Kayadibi, Saim., & Buang, Ahmad Hidayat.2011. The Role of Islamic Studies in Muslim Civilization in The Globalized World: Malaysian Expereince. Jurnal Hadhari, 3. (2). Hal 44.

meminta bantuan pawang dan dukun Melayu untuk membuka kawasan tersebut, supaya mereka tidak diganggu oleh unsur-unsur jahat seperti jin dan hantu. Begitu juga terdapat catatan yang menyatakan bahawa masyarakat setempat di Kuala Lumpur pernah meminta pertolongan pawang Melayu yang amat mahir dalam menewaskan buaya yang sering memakan manusia di Sungai Lumpur. Pernah digambarkan dalam sejarah bahwa hal ini sangat menakjubkan bagi pendatang bangsa Eropa ke Kuala Lumpur pada ketika itu.

Berbeda dengan Awal mula perkembangan pendidikan Islam, diperkirakan seiring dengan datangnya Islam di tanah Melayu pada abad ke-14 pada saat itu pula pendidikan Islam dimulai. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa Raja Malaka pertama yang bernama Parameswara yang kemudian dikenal sebagai Megat Iskandar Syah setelah memeluk Islam pada tahun 1414 Masehi, maka saat itulah dimulai sistem pendidikan Islam di Tanah Melayu.⁵⁰ Masuknya Islam sang raja diikuti oleh para pembesar kerajaan beserta rakyatnya. Dalam upaya memahami kandungan ajaran Islam, raja dan pembesar kerajaan belajar dari para ulama dan pendakwah yang datang ke Malaka. Raja-raja Malaka yang lain mengikuti jejak Raja Malaka untuk memeluk Islam. Pada saat itu istana kerajaan dijadikan pusat kegiatan pendalaman keilmuan Islam karena begitu cintanya raja beserta rakyat terhadap ajaran Islam.

Sistem pendidikan Islam pada awalnya berbentuk kelas mengaji al-Qur'an yang mengajarkan Al-Qur'an dan Hadist pada tempat yang sederhana atau tradisional, seperti surau, masjid, majlis khalifah, kuttab, istana dan rumah ulama,

⁵⁰ Mohd Roslan Mohd Nor & Wan Mohd Tarmizi Wan Othman "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia", Jurnal At-Ta'dib, Vol 6 No. 1 Juni 2011, hal 50.

institusi non formal tersebut merupakan pelajaran utama pada semua lapisan masyarakat saat itu⁵¹. Juga diperkenalkan huruf jawi untuk memudahkan masyarakat setempat mempelajari huruf-huruf Arab yang menjadi penunjang kemampuan membaca al-Qur'an. Untuk tingkat-tingkat awal, kelas pengajian al-Qur'an dilakukan di rumah guru. Jika jumlah pelajar semakin banyak, pembelajaran dilakukan di surau dan masjid. Struktur pendidikan dan kurikulumnya ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan mengaji al-Qur'an. Pelajaran-pelajaran selain mempelajari al-Qur'an juga mempelajari ilmu Fiqh, Tauhid, Tafsir, Sejarah, Tasawuf, dan Filsafat Islam. Maka pada fase itu pondok sudah menjadi sebuah institusi pendidikan Islam.⁵²

Beberapa selang tahun kemudian, rakyat Malaysia yang hidup aman, makmur dan sentosa dibawah kendali sistem kerajaan, seiring dengan berjalannya waktu, rakyat Malaysia telah kedatangan tamu dari bangsa luar yang dikenal sebagai kaum penjajah yang berawal dari bangsa Portugis (1511 M-1641 M), Belanda (1641 M-1786 M) dan Inggris (1786 M-1957 M). Kaum penjajah yang datang ke negara Malaysia disatu sisi mengambil kekayaan yang ada pada negara Malaysia, tetapi disisi lain membawa paham keagamaan yang berbeda dan sistem pendidikan yang berbeda juga. Namun, walaupun bawaan paham keagamaan dari penjajah yang bertolak belakang dengan rakyat Malaysia dari Suku Melayu, tetapi penjajah tidak surut sama sekali dalam semangat menyebarkan paham agama yang dibawa oleh mereka, sementara dalam hal pendidikan ternyata terkena

⁵¹ Budi Haryanto, PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA, Jurnal Pendidikan Islam Volume 1 , Nomor 1 , September 2015, hal 86.

⁵² Rosnaini Hashim, "Dualisme Pendidikan Umat Islam di Malaysia: Sejarah, Perkembangan, dan Cabaran Masa Depan", Jurnal Pendidikan Islam, Jilid 10 Bil. 2. Hal 10.

imbasnya bagi rakyat Malaysia sehingga pendidikan Islam telah diwarnai oleh kaum penjajah yang bersangkutan⁵³. Gentingnya, kegiatan syiar Islam dan pendidikan Islam menjadi terhambat. Ada yang berpendapat kegiatan dakwah pada saat itu terpaksa dilakukan secara rahasia untuk menghindari ancaman larangan dari pihak penjajah.

Diantara kaum penjajah di Malaysia yang paling banyak membawa pengaruh dari sistem pendidikan Islam di Malaysia adalah kaum Inggris. Kaum Inggris bukan hanya membawa paham yang sekuler, tetapi juga telah menguasai sistem kerajaan dari kekuasaan Sultan di Malaysia⁵⁴.

Puncaknya ketika tahun 1854, sebuah institusi pendidikan atau sekolah al-Qur'an yang berbentuk pondok mulai diambil alih pemerintah Inggris. Bangunannya digunakan sebagai sekolah Melayu pada waktu pagi dan mendapat bantuan penuh dari pemerintah Inggris, selanjutnya sekolah al-Qur'an dilaksanakan pada waktu petang di tempat yang sama.⁵⁵ Upaya ini dianggap bertujuan untuk menjauhkan pendidikan Islam dari kehidupan masyarakat setempat. Jadi pendidikan pada masa penjajahan diketahui ada dua sistem pendidikan yang berlawanan, sekolah kebangsaan sekuler dan pendidikan Islam. Sekolah kebangsaan sebagai sistem pendidikan yang mendapat dukungan penuh penguasa namun kurang mendapat sambutan dari bangsa Melayu karena dianggap dapat merusak aqidah putra-putrinya. Di sisi lain sistem pendidikan Islam yang

⁵³ Moh Aslan, "SEJARAH PERJALANAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA" Jurnal TA'LIMUNA, Vol.8, No. 1, Maret 2019, hal 34.

⁵⁴ Mior Jamaluddin, Mior Khairul Azrin bin. 2011. "Sistem pendidikan di Malaysia: Dasar, cabaran, dan pelaksanaan ke arah perpaduan nasional." Sosiohumanika 4 (1). Hlm. 35.

⁵⁵ Budi Haryanto, PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA, Jurnal Pendidikan Islam Volume 1 , Nomor 1 , September 2015, hal 90.

berbentuk pondok tidak diakomodasi oleh penguasa namun tetap diminati masyarakat setempat.

Setelah beberapa tahun Malaysia mengalami kemerdekaan, yakni pada tahun 1960, secara keseluruhan kurikulum di Malaysia berkewajiban untuk memberikan pendidikan agama Islam di setiap sekolah, baik sekolah Islam formal maupun non formal yang siswanya beragama Islam.⁵⁶ Sistem pendidikan Islam terdiri dari tiga bagian, yakni pra sekolah, persekolahan dan sistem pengajian tinggi Islam. Sistem pendidikan Islam pra sekolah dikenal sebagai penubuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam (TASKI) yang didirikan pada tahun 1975 oleh Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), yang bertujuan untuk memberikan pendidikan asas Islam di masa awal sekolah dan memasuki sekolah rendah. Setelah selesai sekolah pra sekolah, maka akan memasuki sekolah pada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah yang terbagi dari dua bagian, yakni sekolah rendah atau menengah kerajaan dan sekolah rendah atau menengah swasta. Sekolah menengah swasta ini mempunyai kelebihan dalam subjek agama.

Kemudian, setelah selesai maka mengikuti pendidikan selanjutnya yang dikenal sebagai pengajian tinggi. Suku Melayu yang mendominasi di Negara Malaysia tersebut, sehingga Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di tingkat semua sekolah di Malaysia, sementara agama menggunakan huruf jawi. Namun, pemerintah yang telah mewajibkan mata pelajaran agama Islam, mengalami hambatan karena kurangnya minat bagi siswa-siswa di Malaysia terhadap mata pelajaran ini, yang salah satu juga kemungkinannya adalah mata pelajaran

⁵⁶ Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman. "Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia." Jurnal At-Ta'dib 6 (1) 2011, Hlm. 65.

pendidikan agama menggunakan huruf jawi yang kurang disenangi oleh anak-anak didik di Malaysia. Dapat juga ditelisik awal mula sejarah lahirnya institusi pendidikan Malaysia berdasarkan fasenya dapat dibagi menjadi menjadi 2⁵⁷:

1. Fase Pra Kolonial Inggris

Sistem pendidikan negeri ini sudah ada sejak masa kejayaan penguasa Melaka, masuknya agama Islam yang merantau ke Asia pada abad ke-15 membuat sistem pendidikan pada masa itu berdasarkan Islam. Di zaman sekarang ini, Islam diajarkan di rumah guru, kemudian dipindahkan ke masjid, istanah dan madrasah dan akhirnya dipusatkan di sekolah gubuk. adapun pengembangan pendidikan Islam dibagi menjadi 3 tahap:

- a. Tahap Pertama: (bertempat di rumah guru) siswa belajar mengaji al-quran dan fardu ain dari guru yang disebut ulama.
- b. Tahap Kedua: (berpusat di masjid, suraus dan madrasah) peningkatan jumlah siswa. Di sisi lain para ulama sangat dipuji oleh masyarakat. Terkadang mereka diundang ke istana untuk mengajar kerabat Raja.
- c. Tahap Ketiga: (berbasis di rumah pondok), sekolah agama tradisional pertama, tidak ada pengukuran standar, Kurikulum berdasarkan Masjid Al Haram di Makah. Maka dari itu mata pelajaran berupa tauhid, al-quran, fiqh, hadits, nahwu, sufi, tasawwuf, akhlaq, arab dan jawi.

⁵⁷ Arba'iyah Mohd Noor, PERKEMBANGAN PENSEJARAHAN ISLAM DI ALAM MELAYU (Development of Islamic Historiography in Malay Archipelago), Jurnal Al-Tamaddun Bil. 6 (2011), hal 31.

Pada tahun 1511, ketika Portugis berperang melawan Melaka, mereka memperkenalkan pendidikan berdasarkan agama Kristen dari sekte Katolik Roma. Kemudian diubah menjadi sekte Protestan ketika Melaka jatuh ke tangan Belanda. Pada 1786, ketika Inggris menguasai dunia Melayu, sistem pendidikan beralih ke sistem pendidikan Inggris.

2. Fase Kolonial Inggris

Meskipun era kolonialisme Inggris berlangsung sekitar 2 abad, Jepang menguasai negara itu dari 1942 hingga 1945. Selama periode itu, semua sekolah yang ada ditutup kecuali sejumlah kecil yang terbuka untuk mengajar bahasa Jepang. Adapun perkembangan yang terjadi pada masa penjajahan, Brazil memiliki sistem pendidikan di Malaya yang dikategorikan menjadi dua tahap. Terdiri dari pelatihan dasar, menengah dan guru. Sejarah Dasar Dan Menengah Malaya pada tahun 1854 di atas Gubernur Serikat telah diarahkan oleh manajemen East India Company untuk memberikan laporan tentang status pendidikan ketika itu dan penasihat Pemerintah India untuk melanjutkan tindak lanjut yang akan diambil di beberapa kasus. Di bawah pemerintahan Inggris saat itu, ketiga negara tersebut, China dan India dipisahkan dalam hal pendidikan.

Inggris mengadopsi kebijakan "Break and Order" dalam sistem pendidikan yang dirancang untuk menciptakan perpecahan di antara

masyarakat umum⁵⁸. Orang Melayu diberi pendidikan dasar selama enam tahun untuk mencapai tujuan berikut:

- a. Memberikan keterampilan dasar melalui Aritmatika agar anak laki-laki dapat menjalankan bisnis kecil ketika mereka besar nanti.
- b. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai luhur seperti kesucian diri, kebersihan lingkungan. Dan
- c. Untuk memastikan kecakapan bahasa Inggris di antara anak-anak Raja untuk orang India, mereka diberi pendidikan dasar dan diberi tempo yang sama dengan orang Melayu.

Pada akhir masa sekolah, mereka akan menjadi buruh di perkebunan karet dan rel kereta api, kebijakan semacam itu mengurangi mobilitas ekonomi dan geografis ras. Sedangkan orang Tionghoa diberi kebebasan untuk memperluas sekolahnya dan menggunakan kurikulum, guru dan buku pelajaran dari Cina. Hal ini dikarenakan Inggris menganut kebijakan bahwa tidak tanggung jawab mereka untuk memberikan pendidikan kepada penduduk setempat dengan kebijakan tersebut, tidak heran bila Inggris mengembangkan sekolah bahasa Inggris untuk menyediakan tenaga untuk mengajar hanya kepada orang Inggris⁵⁹.

Pelatihan Guru Sebelum Perang Dunia Kedua, tenaga kependidikan mengalami masalah berikut:

⁵⁸ Syaiful Akhyar Lubis , PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA: Keberadaan dan Implementasi sampai abad ke-20, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 15(1), 2017, hal 44.

⁵⁹ Rahimah Embong, PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA: MALAYSIA DAN INDONESIA, Jurnal TAMADDUN. Vol. 21. No.1, Januari 2020, hal 38.

- a. Gaji yang rendah itu menyebabkan banyak guru mengundurkan diri atau mengundurkan diri dari jabatannya.
- b. Minat perempuan menjadi guru cukup rendah.
- c. Pelatihan guru melayu sangat mengecewakan.

Permasalahan tersebut muncul sebagai kelanjutan dari praktik Pemerintah Inggris yang mengambil guru dari Inggris untuk mengajar di sekolah-sekolah di negara tersebut. Pada tahun 1870, situasi tersebut berubah ketika Komite Wooley meninjau situasi pendidikan di Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Dibutuhkan lebih banyak guru yang terlatih dan berkualifikasi tinggi.
- b. Pihak berwenang menyadari pentingnya pelatihan profesional bagi para guru yang harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka.
- c. Kekurangan guru terlatih di sekolah Melayu juga perlu mendapat perhatian serius.

Namun ditengah permasalahan yang terjadi, Inggris dalam perjalanannya menjajah negara Malaysia telah mendirikan perguruan tinggi sebagai berikut:

- 1) Telok Belanga Teachers College, Singapura (1878)
- 2) Perguruan Tinggi Melayu Maktab Taiping, Perak (1878)
- 3) Universitas Maktab Malacca, Melaka (1900)
- 4) Perguruan Tinggi Melayu Maktab Matang, Perak (1913)

5) Perguruan Tinggi Guru Sultan Idris Di Tanjong Malim, Perak (1922)

6) Sekolah Latihan Guru Wanita Melayu, Melaka (1935)

Ditemukan bahwa bahan bacaan dan referensi dalam bahasa selain bahasa Inggris cukup rendah pada saat itu. Untuk mengatasi masalah ini dan lebih memperkuat pasokan bahan-bahan tersebut, pihak Inggris mendirikan sebuah pusat yang dikenal sebagai Biro Penerjemahan pada tahun 1942 dan berlokasi di Sekolah Guru Sultan Idris, Tanjong Malim.

Upaya pemerintah Inggris yang membuka sekolah Melayu di pagi hari awal mulanya kurang mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Namun pihak penguasa tidak putus asa, mereka memberikan iming-iming bahwa para lulusan sekolah Melayu nantinya akan dipekerjakan sebagai pegawai, polisi dan sebagainya. Akhirnya pada penghujung tahun 1930-an golongan orang Melayu mulai tertarik untuk mengikuti sekolah di sekolah Melayu dan sekolah Inggris⁶⁰. Walaupun pihak penjajah dapat mendirikan sekolah Melayu dan menyingkirkan sekolah al-Qur'an di waktu petang, namun masyarakat Melayu tetap mempertahankan asas pendidikan Islam yang menjadi warisan agama dan bangsa. Mereka berhasil mempertahankan institusi tradisional. Sistem pendidikan Islam masih menjadi pilihan utama para pemuda. Bahkan beberapa

⁶⁰ Rosnaini Hashim, "Dualisme Pendidikan Umat Islam di Malaysia: Sejarah, Perkembangan, dan Cabaran Masa Depan", Jurnal Pendidikan Islam, Jilid 10, hal 66.

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke luar negeri, seperti Pattani, Mekkah, Mesir, dan negara Islam lain⁶¹.

Lembaga pendidikan Islam semula berbentuk pondok dengan tempat belajar mengajar memanfaatkan masjid, kemudian berkembang menjadi madrasah atau sekolah agama yang dilengkapi bangunan sekolah, asrama, kantor pengurus, dan fasilitas rekreasi. Pembaharuan pandangan dalam memahami dan mempelajari Islam dibawa oleh para pelajar yang baru lulus dari Universitas Al Azhar, bahwa memahami Islam harus lebih utuh. Gagasan mereka dicetuskan dengan mendirikan madrasah.

Pelajaran Agama Islam terus mendapat perhatian utama. Tahun 1952 diterbitkan Ordonansi Pelajaran 1952 dimana pelajaran agama Islam menjadi mata pelajaran di sekolah bantuan pemerintah. Pada masa setelah kemerdekaan, berdasarkan rekomendasi Laporan Rahman Talib tahun 1960, Undang-undang Pendidikan tahun 1961 mewajibkan sekolah-sekolah bantuan kerajaan menyediakan pendidikan Agama Islam, anggaran belanja untuk pendidikan Islam ditanggung oleh Kementerian Pendidikan. Tahun 1962 diberlakukan ketentuan jam pelajaran pendidikan Agama Islam sebanyak 120 menit seminggu.

Malaysia saat ini membagi institusi pendidikan menjadi 3 kategori institusi pendidikan yaitu: Institusi Pendidikan Kerajaan, Institusi Pendidikan Bantuan Kerajaan, Institusi Pendidikan Swasta. Di sisi lain, sistem pendidikan di Malaysia memiliki 5 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan prasekolah,

⁶¹ Mohd Roslan Mohd Nor & Wan Mohd Tarmizi Wan Othman "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia", Jurnal At-Ta'dib, Vol 6 No. 1 Juni 2011, hal 57.

pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan lepas menengah, pendidikan tinggi (tidak termasuk pendidikan internasional)⁶².

B. Geografi dan Demografi Malaysia

Malaysia memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Luas wilayah Indonesia sebesar 5,77 kali dibandingkan dengan luas wilayah Malaysia. Malaysia memiliki luas sejumlah 17,32% atau 329. 847 km². Jumlah kepadatan penduduk di Malaysia hanya 91,50 orang yang sama juga halnya dengan kepadatan penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Malaysia pada bulan Juli 2014 berjumlah 30.073.353. Penduduk Malaysia lebih sejahtera dibandingkan Indonesia. Sementara, berkaitan dengan sumber daya alam antara Indonesia dan Malaysia, mempunyai sumber daya alam yang sama yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, timah, tembaga, kayu dan bauksit. Begitu juga halnya dengan bidang pertanian yang terdiri dari minyak sawit, beras, kakao, dan karet. Sedangkan, dalam hal produk peternakan dan pertanian yang terdiri unggas, daging sapi, udang, kopi, jamu, minyak esensial, ikan dan rempah-rempah, bahwa Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia. Adapun dilihat dari industri, Indonesia dan Malaysia hanya mengandalkan industri tekstil, pakaian, alas kaki, otomotif, semen, makanan olahan, perhiasan dan pariwisata. Malaysia memiliki keunggulan dalam hal industri semi konduktor yang mana di Indonesia masih belum memiliki.⁶³

⁶² Undang-Undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996.

⁶³ Munandar, Yusuf. 2014. Menemukan Arah Kerja Sama Ekonomi Indonesia dengan Negara Mitra: Malaysia, Singapura, Bosnia Herzegovina, Moldova, dan Solomon Islands. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 29-31.

Suku di Malaysia terdiri dari Suku Melayu dengan mencapai 62%, China 8% dan sisanya terdiri dari Suku India dan suku lainnya. Dengan demikian, jumlah yang begitu kecil dibandingkan dengan negara Indonesia, maka tidak dipungkiri kemajuan-kemajuan yang ada di Malaysia, baik dalam hal pendidikannya, maupun dalam hal bidang pekerjaannya, yang mana dari bidang pekerjaan rakyat Indonesia hamper setiap tahun dengan jumlah yang luar biasa bekerja di Malaysia, sedangkan dalam hal pendidikan, terlihat dari gaji pegawai negara yang digaji oleh pemerintah Malaysia lebih besar dibandingkan dengan Indonesia⁶⁴.

Dengan kadar kelahiran kasar 22.6 dan kadar kematian 4.5 per 1,000 penduduk tahun 2000 pertumbuhan penduduk di Malaysia dijangka masih tinggi pada masa hadapan. Mengikut unjuran tinggi Bangsa Bersatu penduduk Malaysia akan meningkat kepada 44.9 juta, penduduk 0-14 tahun sebanyak 24.2 peratus dan 13.1 peratus berumur 65 tahun dan ke atas serta kadar pertumbuhan 1.03 peratus menjelang tahun 2050 akan datang (United Nations 1999). Di Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang melancarkan dasar 70 juta penduduk pada tahun 1982 menyatakan bahawa Malaysia dapat menampung sebanyak 70 juta penduduk pada tahun 2100.⁶⁵

Di Malaysia kadar pertumbuhan penduduk yang tinggi sejak lebih 30 tahun yang lalu telah memberikan impak yang besar terhadap negara dan

⁶⁴ Wekke, Suyatno dan Ismail Suardi. 2018. *Governance In Southeast Asia: Indonesia-Malaysia Perspective on Politics and Social Studies*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 12.

⁶⁵ Dwyer, D.J. (1987) New population policies in Malaysia and Singapore, *Geography*, 72, Hlm 248-249.

masyarakat Pendekatan yang baik haruslah dicari bagaimana penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh kadar pertumbuhan yang tinggi ini dapat diselesaikan. Selain daripada peruntukan yang lebih besar disediakan dalam bidang pendidikan kerajaan juga haruslah melihat masalah sosiodemografi itu daripada persepektif sesuatu kawasan. Isu yang utama bagaimana untuk memastikan setiap pelajar sekolah rendah menyumbangkan pelajaran ke tingkatan satu.

C. Guru dan Jenjang Pendidikan di Malaysia

Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam dunia pendidikan. Pendidikan guru merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem pendidikan. Keberhasilan implementasi kurikulum di bidang pendidikan bergantung pada sejauh mana seorang guru dapat membentuk siswanya untuk berguna bagi masyarakat dan negara. Semua karena keterampilan profesional seorang guru terletak pada kemampuannya menggunakan pengetahuan dan dengan demikian membentuk sikap dan nilai yang benar⁶⁶.

Guru juga yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada siswa atau peserta didik dalam perkembangan jasmani rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaannya, maupun mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah SWT, serta mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri⁶⁷.

⁶⁶ Thesis Atas Nama Wan Harun Bin W. Yaacob, "Pendidikan Guru Di Malaysia: Perkembangan dan Perubahan Kurikulum Ilmu Pendidikan Di Maktab Perguruan, Tahun 1957 Hingga 1986", Universiti Sains Malaysia, 2008, hal 22.

⁶⁷ Abudun Nata, Ilmu Pendidikan Silam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal 159.

Pendidikan guru di Malaysia merupakan tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengungkapkan metode dan teknik pengajaran formal kepada setiap calon guru, baik di perguruan tinggi atau di lembaga publik perguruan tinggi untuk menyesuaikan calon guru dengan tugasnya saat di ruang kelas nanti. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah Malaysia pada tahun 1957 adalah mengubah sekolah dasar yang sudah ada menjadi sekolah nasional, kemudian mewajibkan guru untuk memiliki linsensi atau sertifikat mengajar. Dalam akta 550 seksyen 103 menyatakan, bahwa “tiada seorang pun boleh mengajar di sesuatu institusi pendidikan melainkan jika dia didaftarkan sebagai guru di bawah Akta ini”⁶⁸.

Penjelasan dari pasal diatas adalah sebagai syarat untuk lulus dan mendapatkan Sertifikat Pengajaran, semua guru pelatihan diwajibkan untuk mengikuti dan lulus kursus Ilmu Pendidikan. Untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah melatih para guru untuk mengajar di tingkat SD, SMP, dan SMA. Pada tahun 1960, Departemen Pendidikan membentuk Divisi Pelatihan Guru untuk mengkoordinasikan program-program di tingkat perguruan tinggi. Pembentukannya merupakan upaya pemerintah untuk mementingkan pendidikan guru. Pembangunan beberapa perguruan tinggi keguruan membuktikan pentingnya upaya mencetak guru yang berkualitas. Ini karena pendidikan guru merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah.

⁶⁸ Undang-Undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996.

Dengan adanya pengawasan dan pendidikan guru, para guru bisa lebih memberikan pendidikan dan ilmunya menjadi suatu yang sangat bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat bisa menjadi pertolongan kita kelak di akhirat, seperti hadist yang telah diriwayatkan oleh Muslim :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim)

Di sisi lain, ada beberapa tahapan Jenjang pendidikan di Malaysia. Pertama adalah pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang disediakan oleh beberapa instansi pemerintah, badan swasta, dan lembaga-lembaga sukarela dan diikuti oleh anak didik berusia 4-6 tahun⁶⁹. Bahasa yang diajarkan di tadika atau pendidikan prasekolah sebagai bahasa pengantar bisa berupa bahasa selain bahasa kebangsaan Malaysia, tetapi jika institusi tersebut menggunakan bahasa selain bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. Setelah pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan selanjutnya adalah pendidikan rendah atau pendidikan dasar, Pendidikan dasar adalah wajib bagi semua anak-anak antara usia 7 hingga 12 tahun. Dalam Akta 550, sebuah institusi pendidikan dasar harus melakukan pembelajaran kepada siswa dengan jangka waktu enam tahun tetapi dapat pula diselesaikan dalam jangka waktu antara lima sampai tujuh tahun⁷⁰.

⁶⁹ Andi Aslindah, Pendidikan Islam Di Malaysia: Jenis, Jenjang, Kebijakan, Dan Tujuan Pendidikan, Lentera Pendidikan, Vol. 18 No. 1 Juni 2015, Hal 21.

⁷⁰ Undang-Undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996.

Ketika selesai dari jenjang pendidikan rendah, maka warga negara Malaysia diharuskan meneruskan ke jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah terbagi menjadi 2 siklus: menengah bawah, berlangsung 3 tahun yang disebut Form (tingkatan) I-III, dan menengah atas, berlangsung 2 tahun yang disebut Form (tingkatan) IV-V. Siswa sekolah pendidikan dasar nasional langsung melanjutkan ke Form I. Adapun siswa dari sekolah tipe-nasional (Cina dan Tamil) mengikuti kelas transisi 1 tahun untuk mendapatkan bekal bahasa Melayu yang memadai, kecuali bagi siswa yang mendapatkan nilai yang memuaskan pada Tes Penilaian Primer, siswa tersebut dapat langsung mengikuti Form I. Di akhir tahun pendidikan menengah pertama (form III), siswa menjalani Ujian Penilaian Menengah Pertama (Lower Secondary Assessment Examination). Pada tingkat menengah atas, siswa dapat memilih salah satu di antara dua program yang ditawarkan: akademis dan teknik (kejuruan). Di akhir tahun, pendidikan siswa di bidang akademi menjalani ujian *Malaysia Certificate of Education* (MCE) yaitu sertifikat pendidikan Malaysia⁷¹.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa mengejar pendidikan pasca pendidikan menengah/pendidikan lepas menengah untuk melanjutkan dengan Form VI atau pendidikan matrikulasi untuk persiapan masuk universitas. Pendidikan matrikulasi dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan masuk khusus dari universitas tertentu. Adapun Form VI ditujukan untuk memenuhi persyaratan dari semua universitas. Ketika siswa dalam tahap Form VI siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sertifikasi Sekolah Tinggi Malaysia (di Indonesia

⁷¹ Andi Aslindah, Pendidikan Islam Di Malaysia: Jenis, Jenjang, Kebijakan, Dan Tujuan Pendidikan, *Lentera Pendidikan*, Vol. 18 No. 1 Juni 2015, Hal 16-26.

dikenal sebagai SPMB atau UMPTN) yang diselenggarakan oleh Dewan Ujian Malaysia. Lembaga pendidikan tinggi mencakup universitas, akademi, dan politeknik. Program yang ditawarkan beragam, mulai sertifikat, diploma, hingga *degree levels*. Pada tingkat sarjana pendidikan ditempuh selama 3-4 tahun⁷².

Adapun di Malaysia Jenjang perguruan tinggi tidak diwajibkan, tetapi pada umumnya, program gelar sarjana (Bachelor) di Malaysia diselenggarakan dengan durasi 3 hingga 5 tahun⁷³. Untuk bisa mendapatkan gelar Bachelor, mahasiswa harus menyelesaikan sedikitnya 120 kredit dengan memilih mata kuliah utama (major) dan juga khusus (minor). Biasanya, mata kuliah minor ini tidak diwajibkan jika jumlah kuota mata kuliah yang ditentukan sudah terpenuhi. Tersedia juga di Malaysia, program Master dan Doktorat untuk jenjang pascasarjana dengan durasi antara 1-5 tahun (Master) dan 4 tahun (PhDs), Program pascasarjana tersebut disampaikan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar⁷⁴.

D. Tentang Akta 550 Tahun 1996

Setiap negara pasti memiliki kebijakan yang mengatur tentang Pendidikan termasuk berjalannya sistem Pendidikan di negara tersebut. Dua aspek yang pasti ada dalam undang-undang sistem pendidikan nasional adalah tentang dasar dan tujuan pendidikan nasional, yang dirumuskan dengan amat teliti, karena akan

⁷² Hery, Witanto. Sistem Pendidikan Di Negara-Negaraasean . (Stai Ali Bin Abi Thalib: Surabaya. 2009). Hlm. 7.

⁷³ Abdul Halim Hj Mat Diah, Falsafah Pendidikan Islam di Peringkat Ijazah Tinggi di Malaysia Peranan Institusi Dalam Menghadapi Era Globalisasi, jurnal PROGRESIVA, Vol.3, No. 1, 2010, 7-12.

⁷⁴ “Study in Malaysia: Panduan Lengkap Kuliah di Malaysia”. ESI (Egypt Student Information), 11 Juli, 2018. Hal 5.

digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan oleh para praktisi, pegiat pendidikan, semua stakeholder pendidikan. Malaysia sudah memiliki aturan tentang penyelenggaraan Pendidikan pada institusi Pendidikan dengan sebutan Akta 550 atau Akta Pendidikan, yang merupakan kebijakan dasar untuk penerapan Pendidikan. Serupa dengan Indonesia memiliki dasar hukum pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akta Pendidikan Malaysia tahun 1996 disahkan untuk mengubah Akta Pendidikan tahun 1956 dan Akta Pendidikan tahun 1961.

Akta Pendidikan itu sengaja disusun untuk menyambut kedatangan millennium ketiga, abad ke-21. Dengan akta itu Malaysia dengan tegar telah mencanangkan diri menjadi negara yang unggul dalam bidang pendidikan (educational excellence) di kawasan Asia Pasifik. Hal ini sejalan dengan visi Malaysia tahun 2020, yakni menjadi negara yang bebas dan bertaraf International⁷⁵. Sejak 15 juli 1996, Akta 550 telah disusun dan telah di setujui, kemudian diterbitkan pada 1 agustus 1996, dan telah mengalami perubahan pada 15 juni 2009. Adapun tujuan dari Akta 550 adalah menguatkan sistem pendidikan kebangsaan Malaysia agar sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara Malaysia. Dalam Akta 550 disebutkan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencapai visi negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamik.

⁷⁵ Situs resmi pemerintahan Malaysia, <https://www.parlimen.gov.my/misi-visi.html?uweb=web&>, tanggal 23 November 2019.

Hal diatas didasarkan pada rekomendasi pokok Pernyataan Tun Abdul Razak 1956 (Menteri Pendidikan saat itu) yang menjadi dasar kebijakan pendidikan nasional selama ini, Ciri-ciri penting dalam pendidikan kebangsaan Malaysia menurut Razak adalah: Memiliki keinginan membentuk suatu sistem pendidikan kebangsaan untuk semua kaum di Malaysia; Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama; Menjadikan kurikulum yang berorientasi pada lingkungan negara dengan membuat silabus dengan konten yang sama; Memperkuat sistem pendidikan nasional untuk semua siswa di negara malaysia⁷⁶.

Pernyataan sebelumnya yang telah dijelaskan adalah laporan dari proposal pendidikan Melayu yang ditulis pada tahun 1956. Laporan ini berisi tentang penyediaan sekolah-sekolah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil pada tingkat sekolah dasar, dan sekolah Melayu dan Inggris di tingkat sekolah menengah. Sekolah menengah-Melayu disebut sebagai sekolah "nasional" sementara sekolah lain disebut sebagai sekolah "tipe nasional". Akta Pendidikan Kebangsaan disahkan atas landasan Falsafah Pendidikan Negara setelah mengambil pandangan dan aspirasi dari berbagai pihak. Dalam Akta Pendidikan, konsep sistem pendidikan kebangsaan dikuatkan lagi dari Akta Pendidikan sebelumnya karena Akta 550 meliputi semua jenjang pendidikan dari jenjang pra sekolah hingga ke jenjang pendidikan tinggi, dan juga meliputi semua kategori institusi pendidikan, yaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta.

Kedudukan Bahasa kebangsaan Malaysia telah diatur dalam Undang Undang Malaysia dengan ditetapkannya dalam Akta 550 sebagai bahasa

⁷⁶ Robert N. Kearney, "Electoral Politics in an Emergent State: The Ceylon General Election of May 1970", New York: Cambridge University Press, 1975, hal 271.

pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Isi Akta 550 pasal 17 menyatakan:

1. Bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh Menteri daripada subseksyen ini.
2. Jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusi pendidikan adalah selain bahasa kebangsaan, bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di institusi pendidikan itu⁷⁷.

Makna dari syeksen atau pasal 17 adalah bermaksud menjadikan bahasa kebangsaan Malaysia menjadi mata pelajaran yang wajib diajar di setiap institusi pendidikan di malaysia, bahkan jika bahasa pengantar disebuah institusi memakai bahasa asing (bahasa selain Melayu), maka bahasa Malaysia harus menjadi mata pelajaran yang harus diajar. Hal tersebut diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan, karena telah diatur dalam Kurikulum Kebangsaan Malaysia.

Sejajar dengan fokus terhadap usaha memperhatikan pendidikan sains dan teknologi, pendidikan teknik juga akan diterapkan di sekolah menengah teknik dan politeknik. Pasal 35 dan 36 Akta 550 menyebutkan:

Syeksen 35: Menteri boleh mengadakan pendidikan teknik di:

⁷⁷ Pasal 17, Undang-Undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996

1. Mana-mana sekolah menengah kebangsaan yang diperihalkan dalam seksyen 30; atau
2. Institusi pendidikan lain yang diperihalkan dalam perenggan 34(1)(a) atau (1) (c); Syeksen 36: Politeknik yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(c) boleh:
 - (a) menawarkan kursus pengajian dan program latihan yang diluluskan oleh Menteri; dan
 - (b) menganugerahkan sijil, diploma atau apa-apa kelayakan lain yang ditetapkan⁷⁸.

Makna pasal 35 dan 36 adalah Akta Pendidikan tahun 1996 memfasilitasi sekolah kejuruan untuk ditingkatkan menjadi sekolah teknik, sedangkan politeknik bisa mengadakan program kerjasama dengan institusi, perusahaan atau organisasi industri manapun untuk menyelenggarakan kursus atau program pelatihan teknis atau kejuruan, termasuk program pertukaran.

Saat ini Akta Pendidikan 1996 terdiri dari 16 Bahagian (Bagian) yang berisi 156 seksyen (pasal). 16 Bahagian tersebut adalah: Permulaan, Pentabdiran (Administrasi), Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (Dewan Pertimbangan Pendidikan Nasional), Sistem Pendidikan Kebangsaan, Penilaian dan Peperiksaan (Ujian), Pendidikan Tinggi, Institusi Pendidikan Swasta, Pendaftaran Institusi Pendidikan, Pendaftaran Guru, Jemaah Nazir Sekolah (Pengawas Sekolah), Kewangan (Keuangan), Rayuan (Banding), Peraturan-Peraturan, Kesalahan dan

⁷⁸ Pasal 35 dan 36, Undang-undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996.

Penalti (Pelanggaran dan Hukuman), Pelbagai (Lain-lain), dan yang terakhir Peralihan dan Pemansuhan (Transisi dan Pencabutan)⁷⁹.

E. Penerapan Pendidikan Islam Dalam Akta 550

Akta 550 tidak berdiri sendiri dalam menjalankan sistem Pendidikan di Malaysia namun merupakan aturan atau kebijakan atas pelaksanaan Pendidikan di Malaysia berjalan dengan tertib, sehingga dalam akta ini menyebutkan kewajiban setiap institusi untuk menyelaraskan kurikulum kebangsaan, didalam kurikulum kebangsaan juga memuat kurikulum yang digunakan oleh setiap jenjang institusi Pendidikan di Malaysia.

Penerapan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia tidak berbeda jauh dengan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang mengandung dua kurikulum inti sebagai kerangka dasar operasional pengembangan kurikulum, yaitu: tauhid sebagai unsur pokok yang tidak dapat diubah dan perintah membaca ayat-ayat Alquran⁸⁰. Secara keseluruhan, kurikulum di Malaysia mewajibkan setiap sekolah, baik sekolah Islam formal maupun non formal yang siswanya beragama Islam untuk diberikan pendidikan agama Islam. Karena pada dasarnya, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah. Seperti dalam surat Dzariyat ayat 56:

⁷⁹ Undang-undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996

⁸⁰ Abdul Halim Hj Mat Diah, Falsafah Pendidikan Islam Di Peringkat Ijazah Tinggi Di Malaysia Peranan Institusi Dalam Menghadapi Era Globalisasi, Progresiva, Vol.3, No. 1, 2010, Hal 26-28.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku”⁸¹.

Di bawah ini adalah beberapa hal penting yang diterapkan di Undang-Undang Pendidikan 1996: Visi pendidikan dilandaskan kepada Filsafat Pendidikan Nasional; Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan dengan jelas yang mencakup semua tingkatan termasuk pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan pasca sekolah menengah dan pendidikan tinggi; Memperkuat posisi bahasa nasional sebagai media pengajaran dalam sistem pendidikan nasional; Pendidikan swasta diatur dalam Akta atau Undang-undang lain; Ketentuan ujian di setiap institusi pendidikan harus dipatuhi; Bahasa nasional sebagai mata pelajaran wajib; Masa pendidikan dasar antara 5 sampai 7 tahun; Pendidikan pasca sekolah menengah; Pendidikan teknis dan politeknik yang ditingkatkan⁸².

Dalam rangka menciptakan Pendidikan yang merata pada anak, maka pemerintah Malaysia menyiapkan institusi Pendidikan sekolah rendah agar setiap warga negaranya yang sudah keluar dari status balita mempersiapkan diri untuk memasuki institusi Pendidikan yang diwajibkan bagi setiap anak yang berumur 6 tahun sesuai akta pendidikan seksyen 29:

“Tiap-tiap ibu bapa yang merupakan warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun

⁸¹ Qs Adz-Dzariat (4): 56

⁸² Syed Othman Alhabshi dan Hasnan Hakim, “Dasar dan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan”, Penelitian Yang di Presentasikan di Kongres Pendidikan Melayu di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur, Pada 1 – 2 September 2001.

persekolahan semasa anak itu didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah rendah sepanjang tempoh pendidikan wajib”⁸³.

Penjelasan pasal tersebut adalah bahwa tiap masyarakat malaysia yang mempunyai anak yang sudah berumur 6 tahun, maka anak tersebut harus bersekolah. Pendidikan agama Islam sudah diterapkan sejak sekolah rendah, hal ini menjadi perhatian dan usaha pemerintah dalam menyebarkan pemahaman keimanan dan keIslaman anak sejak usia dini. Penerapan Pendidikan agama Islam sangat penting demi kemajuan moral dan akhlak dalam memulai perkembangan otak.

Poin penting atas kewajiban setiap anak yang berumur 6 tahun yang dilakukan pemerintah melalui akta 550 adalah demi menegaskan dan tidak bisa dibantakan oleh warga negaranya sebab telah menjadi dasar hukum yang kuat untuk di patuhi. Namun melalui aturan pemerintah tidak melarang bagi anak yang dibawah umur 6 tahun untuk mengenal pembelajaran agama dan pelajaran lainnya di lembaga Pendidikan non formal dalam rangka peningkatan kemampuan belajar anak. Pemerintah Malaysia juga memfokuskan perhatian kepada guru yang mengajar di setiap institusi pendidikan karena peran guru sangat penting untuk perkembangan siswa, seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa berdasarkan akta 550 pasal 103, guru yang mengajar diharuskan memiliki lisensi atau sertifikasi mengajar. Serta Akta 550 pasal 105 menjelaskan “Permohonan untuk didaftarkan sebagai guru hendaklah dibuat kepada Ketua Pendaftar dalam

⁸³ Pasal 29, Undang-undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996.

borang dan mengikut cara yang ditetapkan”⁸⁴. Maknanya adalah Bahwa jika seseorang ingin mendaftar sebagai guru maka wajib mendaftarkan diri ke Ketua Pendaftar Institut Pendidikan dan Guru.

Selain lisensi guru, Malaysia menerapkan penekanan kepada setiap institusi pendidikan di negaranya agar mempunyai izin kepada Pemerintah untuk mendirikan sebuah institusi, bukan hanya institusi pendidikan untuk murid, tetapi juga institusi pendidikan untuk guru. ini menandakan bahwa pemerintah Malaysia sangat memperhatikan dan mengawasi pendidikan di negaranya agar sesuai dengan tujuan dibentuknya negara Malaysia.

Dalam akta ini juga mengemukakan keistimewaan bagi ummat Islam untuk mewajibkan mendapatkan Pendidikan agama Islam bagi setiap murid yang beragama Islam. berbeda dengan penganut agama selain Islam membolehkan bagi mereka mendapatkan Pendidikan tentang agamanya masing-masing, karena tidak adanya materi pembelajaran pendidikan agama lain dalam kurikulum kebangsaan, yang ada hanyalah pendidikan moral.

Pendidikan agama Islam dalam akta ini menunjukkan dorongan pemerintah dalam menciptakan siswa-siswi yang beriman dan mengenal ilmu agama. Dalam Akta 550 menyatakan:

“Pengajaran yang dikehendaki di sesuatu institusi pendidikan di bawah subseksyen (1) hendaklah selama tempoh sekurang-kurangnya dua jam seminggu dalam waktu pengajaran biasa institusi pendidikan itu atau dalam apa-apa waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal mana-mana institusi pendidikan yang tertentu”⁸⁵.

⁸⁴ Pasal 105, Undang-undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996.

⁸⁵ Pasal 50, Undang-undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996.

Maknanya adalah Pemerintah melalui akta ini mewajibkan bagi institusi Pendidikan agar menerapkan ilmu agama sekurang-kurangnya 2 jam dalam seminggu. Setiap institusi dalam pengawasan pemerintah artinya dibolehkan memberikan materi atau mata pelajaran agama Islam lebih dari 2 jam. Tentunya setiap institusi pendidikan diwajibkan oleh Pemerintah Malaysia untuk melakukan peperiksaan atau ujian, karena hal tersebut juga menjadi bagian penting dalam menilai pemahaman murid tentang ilmu yang sudah diajarkan dalam proses pembelajaran. Kewajiban tersebut diatur dalam akta 550 seksyen 19 yang berbunyi:

“Tiap-tiap sekolah hendaklah menyediakan muridnya bagi peperiksaan yang ditetapkan oleh atau di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini melainkan jika dikecualikan selainnya oleh atau di bawah Akta ini”⁸⁶.

Akta tersebut menjelaskan bahwa setiap sekolah wajib melakukan ujian untuk murid-muridnya serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Untuk diadakannya ujian juga setiap institusi pendidikan di Malaysia membutuhkan izin dari Lembaga Peperiksaan (Direktur Pemueriksa Ujian) agar semua ilmu pendidikan yang telah diajarkan dapat diawasi oleh negara langsung, hal ini diatur dalam akta 550 seksyen 69 yang tertulis:

“Tertakluk kepada subseksyen (4), tiada seorang pun atau tiada suatu institusi pendidikan pun boleh mengendalikan, membenarkan atau menyebabkan diadakan atau dikendalikan, atau dengan apa-apa cara terlibat dalam pengadaan atau pengendalian, apa-apa peperiksaan bagi mana-mana murid institusi pendidikan atau bagi mana-mana calon persendirian tanpa mendapatkan kelulusan bertulis Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu”⁸⁷.

⁸⁶ Pasal 19, Undang-Undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996.

⁸⁷ Pasal 69, Undang-Undang Malaysia Akta 550 Akta Pendidikan 1996.

Pasal tersebut menerangkan bahwa sebuah institusi tidak boleh mengadakan atau melaksanakan ujian tanpa seizin Pengarah Peperiksaan (Lembaga Pengawas Ujian). Pembentukan Lembaga Peperiksaan di Malaysia adalah untuk menciptakan sistem ujian bersama untuk semua sekolah di negara ini sejalan dengan maksud Pernyataan Razak (1956) dan memiliki fungsi Memberikan saran, memantau, menganalisis penilaian berbasis sekolah, serta mengendalikan semua ujian agar mengikuti aturan, pedoman dan instruksi tentang ujian.

Teori sistem terbuka secara umum menjelaskan integrasi input, proses dan output, posisi kebijakan yang di deskripsikan melalui akta 550 merupakan bagian dari input sebagai fasilitas kebijakan dalam pendidikan agama Islam di Malaysia. Kebijakan mengenai pengajaran agama Islam dalam akta 550 dapat dibagi menjadi beberapa kelompok:

1. Pengajaran agama Islam di berlakukan jika jumlah minimal murid beragama Islam 5 orang dalam intitusi pendidikan Malaysia.

Pendidikan adalah kumpulan dari semua proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan-kemampuan, sikap-sikap, dan bentuk- 15 bentuk tingkah laku yang bernilai positif di dalam masyarakat tempat dia hidup. Ummat Muslim di Malaysia merupakan masyrakat peringkat pertama berdasarkan jumla pemeluk agama yang ada di negara tersebut, input dari pada kebijakan Malaysia dengan dengan menempatkan minimal jumlah murid yang beragama Islam di Institusi tertentu adalah 5 orang agar untuk menghasilkan pemerataan pengajaran agama Islam terhadap

pemeluk agama Islam di Malaysia yang jumlahnya mencapai 61% pada tahun 2013 atau 19,5 juta penduduk muslim Malaysia⁸⁸. Angka diatas ketika dibandingkan jumlah muslim dan non muslim adalah 6:4 (enam banding empat). Sehingga output dari kebijakan diatas adalah pemerataan pendidikan agama Islam kepada seluruh warga negaranya, sedangkan prosesnya kebijakan ini diberlakukan melalui institusi pendidikan yang dapat diawasi oleh negara.

2. Durasi pengajaran pendidikan agama Islam dalam institusi pendidikan Malaysia minimal berjumlah 2 jam dalam seminggu, atau dapat diatur oleh menteri pada institusi Tertentu.

Kebudayaan Malaysia dalam perkembangan pendidikan agama Islam dimulai dari surau dan masjid, namun bukan berarti dengan adanya sekolah formal pendidikan agama Islam di surau dan masjid ini hilang. Keniscayaannya pembelajaran agama di surau tetap hidup sebagai pondasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan beragama. Melalui kebijakan ini pemerintah berupaya membantu dalam meningkatkan basis agama dalam institusi pendidikan formal, maka output dari pembelajaran ini setiap warga negara mampu menyerap pendidikan agama dalam sekolah formal yang bersifat pelajaran agama dasar berupa Al-Quran, hadis, tafsir, dan fikih⁸⁹.

⁸⁸ Pew Research center religion & public life, The Future of the Global Muslim Population, 27 Januari 2011, Malaysia. <https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/#/Malaysia> , diakses pada february 2021.

⁸⁹ Kementerian pelajaran Malaysia, “Modul pendidikan Islam rendah”, Malaysia 2011, Hlm. 123

3. Orang tertentu yang memiliki otoritas dalam sebuah institusi boleh melakukan atau membuat kebijakan yang dapat mengembangkan pengajaran agama Islam di Malaysia.

Dalam rangka pengembangan pendidikan agama Islam kepada segenap ummat muslim maka pemegang otoritas dalam setiap institusi diberikan kelonggaran dalam mengembangkan kebijakan pendidikan agama. Misalnya durasi 2 jam dalam seminggu dapat dikembangkan jika pendidikan agama pada institusi tersebut sangat perlu diperdalam dan ditingkatkan.

4. Pengajar yang telah terdaftar boleh mengajarkan murid yang menganut agama Islam dalam institusi berbeda atau menggabungkannya.

Untuk menciptakan minimalis kekurangan jumlah pengajar pendidikan agama pada institusi pendidikan maka kebijakan ini menguatkan setiap pengajar agama Islam boleh mengajari pelajaran agama lebih dari satu institusi atau jika diperlukan boleh melakukan penggabungan institusi dan murid sehingga pelajaran agama mampu ditransformasikan secara merata.

5. Bantuan operasional institusi pendidikan agama Islam tetap diberikan walaupun bukan merupakan institusi yang diawasi oleh menteri atau negara.

Bantuan pemerintah kepada institusi sangat dibutuhkan sebagai dasar pengembangan system pembelajaran baik berupa bantuan pengembangan kualitas fasilitas belajar-mengajar, hingga peningkatan sumberdaya. Sebab pelajaran agama Islam di Malaysia dinilai sangat penting maka hal ini terus

didorong sebagai upaya peningkatan porses belajar-mengajar agama terhadap masyarakat.

Dari teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, teori tersebut bisa menjadi acuan perkembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia, di lain sisi ada beberapa tambahan teori Menurut Al-Kattani yang mana ada beberapa hal yang menjadikan belajar dimalaysia menarik, diantaranya adalah⁹⁰:

1. Fasilitas perpustakaan yang cukup memadai. Buku-buku dan jurnal Islam yang diperlukan dalam kajian keIslaman baik yang berbahasa Arab, Inggris, Melayu dan lain sangat representatif.
2. Bantuan keuangan dari unuversistas yang diberikan kepada para mahasiswa yang sedang menyelesaikan penelitian tesis dan disertasi.
3. Biaya perkuliahan relatif murah dengan fasilitas yang sangat memadai.
4. Universitas-universitas malaysia sering mengadakan seminar baik skala nasional maupun internasional.

Dapat dipahami banyak sekali faktor pendukung yang sarana dan menciptakan pendidikan Islam di Malaysia menjadi menarik dan bermutu. Dengan adanya pendukung yang sudah memadai ini, Malaysia akan menjadikan pendidikan Islam secara otomatis terimplementasi dengan baik, maka Indonesia patut meniru faktor-faktor tersebut agar pendidikan Islam menjadi lebih baik juga.

Adapula teori lain dari Baharuddin yang menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, perlu kita ketahui, pengaruh rendahnya kualitas pendidikan

⁹⁰ Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, "Study in Islamic countries", Gema Insani: Jakarta (2009). Hal 64.

di Indonesia juga akan berdampak pada kualitas pendidikan Islam yang ada di Indonesia, faktor-faktor tersebut adalah⁹¹:

1. Rendahnya komitmen pemerintah kepada dunia pendidikan Secara konstitusional komitmen nasional kepada dunia pendidikan sangat tinggi. Hal itu tersirat dari ungkapan tujuan bangsa Indonesia adalah mencerminkan kehidupan bangsa. Ungkapan itu tersirat pada pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, dan GBHN. Namun dalam operasionalnya, bertolak belakang dengan itu. Dengan kata lain, komitmen pemerintah kepada dunia pendidikan rendah, hal ini dapat dilihat dari belanja negara pada sektor pendidikan sangat rendah, dibanding dengan negara Malaysia terutama pendidikan Islam lebih rendah daripada pendidikan umum.
2. Lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik, misalnya guru, dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: (a). Latihan pra jabatan Latihan pra jabatan pada sistem kepegawaian , tidak memberikan manfaat yang besar bagi tugas jabatan tenaga pendidik. (b). Penataran, latihan, dan lain-lain, adalah ajang proyek yang intinya adalah laporan administrasi keuangan, bukan kualitas peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik.(c). Kesejahteraan tenaga pendidik. Gaji guru adalah yang paling rendah dan banyak potongannya.

⁹¹ Baharuddin. “Aktualisasi Psikologi Islam”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Hal 236-237.

3. Kekeliruan Filosofis. Minimal ada 3 persoalan mendasar yang dipersepsikan secara keliru oleh masyarakat, yaitu: "apa pendidikan", apa mutu pendidikan", dan apa produk pendidikan".

Pemaknaan kepada pendidikan adalah: "proses bantuan kepada anak didik menuju kedewasaan." Persepsi seperti itu melahirkan sikap memperlakukan anak sebagai organisme yang memerlukan bantuan, lemah, dan sebagai objek pendidikan. Guru menjadi subjek, serba mengetahui, dan memberikan bantuan. Kalau tidak dibantu pendidikan, anak tidak akan bisa dewasa. Demikian juga dengan "mutu", masyarakat selalu mengartikan "mutu" pendidikan dengan prestasi IP atau IPK, atau nilai ujian EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir), bahkan lulus UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri), sekolah yang paling banyak siswanya masuk ke PTN (Perguruan Tinggi Negeri) adalah sekolah yang bermutu. Maka suburilah bimbingan "test" dan "bimbingan studi", supaya siswa dapat nilai tinggi dan bisa lulus UMPTN. Mungkin ini gejala aneh dan tidak pernah terlihat di negara yang maju dunia pendidikannya. Sama saja dengan itu, kekeliruan juga terjadi pada makna filosofis "produk" pendidikan. "produk" pendidikan selalu diartikan dengan lulusan atau tamatan sekolah atau madrasah. Padahal lulusan itu bukanlah 100% hasil dari proses pendidikan dan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Hanya sedikit sekali peran lembaga pendidikan.

Maka solusi pemecahannya adalah sebagai berikut: (a). Merubah paradigma Filosofis Makna pendidikan. "pendidikan adalah proses pengembangan

potensi anak didik: anak didik kreatif, subjek pendidikan, guru menciptakan, suasana kondusif. Disamping itu mutu pendidikan: "kesesuaian antara produk, dengan kebutuhan pelanggan". Pelanggan pendidikan adalah siswa, orang tua, masyarakat, negara, perusahaan dan lain-lain. (b). Produk pendidikan bukan lulusan, tetapi pelayanan yang meliputi: pelayanan administrasi, kurikulum, ekstrakurikuler dan ko kurikuler, pengajaran, penelitian. (c). Pembelajaran, demokratis, dialogis, dan multialogis. Sumber belajar bukan guru, atau dosen tetapi perpustakaan, laboratorium, dan lapangan.

Sama halnya dengan teori-teori diatas, menurut Adi Purwanto, untuk pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia yang berkualitas dapat dirumuskan dengan cara mengetahui solusi atas permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam praktik Pendidikan Islam yaitu:

1. Kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi yang masih kurang;
2. Metode dan Pendekatan yang digunakan dalam Pendidikan Islam yang kurang tepat;
3. Belum dilaksanakannya manajemen mutu Pendidikan Islam secara baik;
4. Kinerja Pendidik yang masih belum maksimal;
5. Praktik pembelajaran dalam Pendidikan Islam yang masih bersifat latihan mengasah otak saja.

Dari permasalahan diatas, solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, sekaligus dapat dijadikan upaya untuk pengembangan kualitas Pendidikan Islam di Indonesia, antara lain dengan: (a).

Mengintegrasikan berbagai produk dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam sistem Pendidikan Islam; (b). Menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran yang sifatnya menyeluruh, yang menggabungkan antara pendidikan Islam yang diberikan di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat, yang diimbangi dengan cara penyampaian yang komunikatif dan keteladanan pengamalan nilai-nilai Islam; (c). Penerapan manajemen mutu Pendidikan Islam yang mencakup pengelolaan terhadap lembaga pendidikan berikut seluruh komponen pendidikan di dalamnya, yang meliputi tenaga kependidikan, peserta didik, sarana pendidikan, proses pembelajaran, dan hubungan dengan masyarakat; (d). Peningkatan kesejahteraan pendidik untuk mendorong peningkatan etos kerja pendidik, yang pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan; (e). Mengarahkan praktik pembelajaran dalam Pendidikan Islam pada tujuan peningkatan kepaahaman, penguasaan, dan penerapan nilai-nilai Islam oleh peserta didik⁹².

Dalam menghadapi era globalisasi untuk pendidikan Islam, mujamil qomar dalam bukunya menyatakan secara garis besar ada tiga langkah mendasar atau langkah yang seharusnya mendapat perhatian para pemikir, penentu kebijakan, praktisi dan pemimpin lembaga pendidikan⁹³, yaitu:

Pertama, adalah membangun kesadaran pada semua lapisan masyarakat. Selama ini kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan,

⁹² Adi Purwanto, "Pengembangan Pendidikan Islam Berkualitas di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol 17, No 2, 2019. Hal 114-115.

⁹³ Mujamil Qomar, "Menggagas Pendidikan Islam", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hal 141-144.

termasuk pendidikan Islam. Oleh karena itu, perhatian para guru, dosen, kepala sekolah/madrasah, ketua, rektor mau praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal, kurikulum bukanlah penentu utama. Dalam kasus pendidikan di Indonesia misalnya, problem paling besar yang dihadapi bangsa ini sesungguhnya bukan problem kurikulum meskipun bukan berarti kurikulum tidak menimbulkan problem. Namun, masalah kesadaran merupakan problem yang paling besar yaitu lemahnya kesadaran untuk berpartisipasi, kesadaran untuk sukses, kesadaran untuk meningkatkan SDM, kesadaran untuk menghilangkan kebodohan, maupun kesadaran untuk berbuat yang terbaik.

Kedua, adalah penguatan epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi ini melebihi sarana-sarana lainnya, epistemologi ini merupakan instrumen memproses, menyusun, merumuskan, dan membentuk ilmu pendidikan Islam. Epistemologi inilah yang bertugas menggali, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan pendidikan Islam. Jadi kunci untuk mengatasi kelemahan-kelemahan bangunan pendidikan Islam secara konseptual-teoritis yang selama ini merupakan adaptasi terhadap bangunan konsep pendidikan yang digagas para ilmuwan Barat adalah epistemologi pendidikan Islam. Namun, salah satu kelemahan umat Islam juga terdapat pada wilayah epistemologi pendidikan Islam ini sehingga harus dilakukan penguatan-penguatan secara sistematis dengan membangun konsep-konsep teoritis pendidikan Islam, yaitu: metode rasional, metode intuitif, metode dialogis, metode komparatif, dan metode kritik.

Ketiga, adalah penguatan manajemen pendidikan Islam, secara teoritis atau sebagai ilmu adalah epistemologi pendidikan Islam, maka kunci untuk

memajukan pendidikan Islam secara aplikatif atau secara kelembagaan adalah manajemen pendidikan Islam. Sebagaimana dalam kasus epistemologi umat Islam khususnya para pimpinan lembaga pendidikan Islam juga lemah dalam wilayah manajemen. Maka mereka harus diperkuat kemampuannya dalam manajemen pendidikan Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam Akta 550, pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencapai visi negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika. Tujuan ini dimaksudkan agar dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Peran Akta 550 dalam hal ini pemerintah cukup ketat mendorong pendidikan agama Islam di institusi pendidikan Malaysia. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki banyak institusi pendidikan swasta yang tidak dapat terkontrol dan diawasi oleh pemerintah, sehingga masih banyak kendala model atau kurikulum pembelajaran dan juga fasilitas pembelajaran untuk masyarakat Indonesia, dengan merujuk pada berbagai solusi dari permasalahan

yang ada dipenjelasan sebelumnya, maka Indonesia perlu menerapkan teori-teori atas penjelasan mengenai pembentukan perkembangan pendidikan Islam.

B. Saran

Dari hasil dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis, yaitu:

1. Saran kepada Pemerintah Indonesia terutama Menteri Pendidikan untuk lebih fokus terhadap pengawasan dan pengontrolan kurikulum pendidikan Islam yang ada di seluruh penjuru Indonesia.
2. Melalui penelitian ini, akan menerangkan kepada setaip elemen pembuat kebijakan agar turut serta memperhatikan perkembangan pendidikan agama Islam pada seluruh Institusi atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia mulai dari pemerhatian pada fasilitas dan operasional, hingga kelengkapan dan kompetensi guru-guru dalam memberikan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ishak (1995). *Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Abdul Rohman, Perkembangan Islam dan Gerakan Politikanya di Malaysia, Jurnal Politik Walisongo – Vol 2, No 1 (2020).
- Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, “Study in Islamic countries”, Gema Insani: Jakarta (2009).
- Abudun Nata, Ilmu Pendidikan Silam, (Jakarka: Kencana Prenada Media Group).
- Alias Mat Saad, dkk, “Kajian Kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia”, Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education Vol 3 No2, 2017.
- Abu Ahmadi, Haji, Nur Uhbiyati, “Ilmu pendidikan”, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Acemoglou, D., Johnson, S., and Robinson, J.A., (2005), “Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth”, Handbook of Economic Growth, volume 1, chapter 6.
- Adi Purwanto, “Pengembangan Pendidikan Islam Berkualitas di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol 17, No 2, 2019.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta, CV Rajawali, 1994), Hal. 20.
- Anton Baker dan Ahmad Chris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Andi Aslindah, PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA: Jenis, Jenjang, Kebijakan, dan Tujuan Pendidikan, *Lentera Pendidikan*, Vol. 18 No. 1 Juni 2015.
- Arief Rahman, *Studi Tokoh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Aslan, “Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia”, *Jurnal TA‘LIMUNA*, Vol.8, No. 1, 2019.

- Armai Arief, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Arba'iyah Mohd Noor, PERKEMBANGAN PENSEJARAHAHAN ISLAM DI ALAM MELAYU (Development of Islamic Historiography in Malay Archipelago), *Jurnal Al-Tamaddun Bil.* 6 (2011).
- Ary Antony Putra, "Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazali", *Jurnal Al-Thariqah*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2016).
- Baharuddin. "Aktualisasi Psikologi Islam". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Budi Haryanto, "Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, (September, 2015).
- Dewantara, Ki Hadjar, *Karja I: Pendidikan*, (Pertjetakan Taman Siswa, 1962).
- Enung K Rukia, "Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia", Bandung: Pustaka setia, 2006.
- Hanif Masykur, "Eksistensi dan Fungsi Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Penelitian Tugas Akhir*, (2015).
- Hamid, Ahmad Fauzi Abdul, *Islamic Education in Malaysia*, (Singapore, S. Rajaratnam School of International Studies, 2010).
- Hery, Witanto. Sistem Pendidikan di Negara-NegaraAsean . (STAI Ali Bin Abi Thalib: Surabaya. 2009).
- Jhon Dewey, *Democracy and Education*, (Pennsylvania State University, 2001).
- Jimaain Safar, dkk, "Pendidikan Akhlak Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia Sebagai Asas Kecemerlangan Pencapaian Sains dan Teknologi", *jurnal Ajmain vol 2 no 1*, Universiti Teknologi Malaysia, 2014. Malaysia.
- Kayadibi, Saim., & Buang, Ahmad Hidayat. 2011. The Role of Islamic Studies in Muslim Civilization in The Globalized World: Malaysian Expereince. *Jurnal Hadhari*, 3. (2).
- Kementerian Pelajaran Malaysia (1972), Laporan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Terhadap Pelajaran Ugama Islam Mengikut Shor2 Penyata Razak 1965, dan Jawatankuasa Menyemak Pelajaran 1960. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kementerian Pelajaran Malaysia (1992), Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

- Mastuhu, "Dinamika sistem pendidikan pesantren : suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren / Mastuhu", Jakarta Indonesia Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1994.
- Mohamad Rodzi Abd Razak, "Pembinaan Negara Bangsa Malaysia : Peranan Pendidikan Sejarah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan", Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, Vol 36, 2009.
- Mohd Roslan Mohd Nor & Wan Mohd Tarmizi Wan Othman "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia", Jurnal At-Ta'dib, Vol 6 No. 1 Juni 2011.
- Mohd Roslan Mohd Nor & Wan Mohd Tarmizi Wan Othman "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia", Jurnal At-Ta'dib, Vol 6 No. 1 Juni 2011.
- Moh Aslan, "SEJARAH PERJALANAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA" Jurnal TA'LIMUNA, Vol.8, No. 1, Maret 2019.
- Muhibbin, syah, *Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru*, (Bandung. Pt. remaja rosdakarya, 2007).
- Mior Jamaluddin, Mior Khairul Azrin bin. 2011. "Sistem pendidikan di Malaysia: Dasar, cabaran, dan pelaksanaan ke arah perpaduan nasional." *Sosiohumanika* 4 (1).
- Moh Arif Andrian, "Sistem Pendidikan", *Conference: Filsafat Pendidikan, Malang*, (Mei 2016), hal. 2.
- Mujamil Qomar, "Menggagas Pendidikan Islam", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Munandar, Yusuf. 2014. Menemukan Arah Kerja Sama Ekonomi Indonesia dengan Negara Mitra: Malaysia, Singapura, Bosnia Herzegovina, Moldova, dan Solomon Islands. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 29-31.
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam (Islam dan Umum)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993.
- Nasir, Railwan, *Mengantar Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Jogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005).
- North, D.C., (1991), "Institutions", *Journal of Economic Perspective*, vol 5 (1).

- Ostrom, E., (1986), "An Agenda for the Study of Institutions", *Public Choice*, vol. 48, issue 1.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal 955.
- Rahimah Embong, PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA: MALAYSIA DAN INDONESIA, *Jurnal TAMADDUN*. Vol. 21. No.1, Januari 2020.
- Rizky Afrie, "Sistem Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas (Kajian Kitab al-Fikru at-Tarbawiyya 'Inda Ibni Qayyim alJauziyah Karya Hasan bin Ali al-Hijazy)", *Penelitian Tugas Akhir*, (2015).
- Rosnaini Hashim, "Dualisme Pendidikan Umat Islam di Malaysia: Sejarah, Perkembangan, dan Cabaran Masa Depan", *Jurnal Pendidikan Islam*, Jilid 10 Bil. 2.
- Robert N. Kearney, "Electoral Politics in an Emergent State: The Ceylon General Election of May 1970", New York: Cambridge University Press, 1975.
- Saadon Awang, "Sistem Pendidikan Baru Malaysia: Suatu Pendekatan Holistik-Komprehensif", *Journal of Governance and Development* 69 Vol.6, 2010.
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Suryapermana, Nana dan Imroatun, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Banten: FTK Banten Press, 2017).
- Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1987)
- Siti Rohma, "Relevansi Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun", *Forum Tarbiyah*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2012).
- Syed Othman Alhabshi dan Hasnan Hakim, "Dasar dan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan", Penelitian Yang di Presentasikan di Kongres Pendidikan Melayu di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur, Pada 1 – 2 September 2001.
- Syaiful Akhyar Lubis , PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA: Keberadaan dan Implementasi sampai abad ke-20, *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 15(1), 2017, hal 44.
- UNESCO and education: everyone has the right to education*, (School children in Florida, Colombia, 2011).

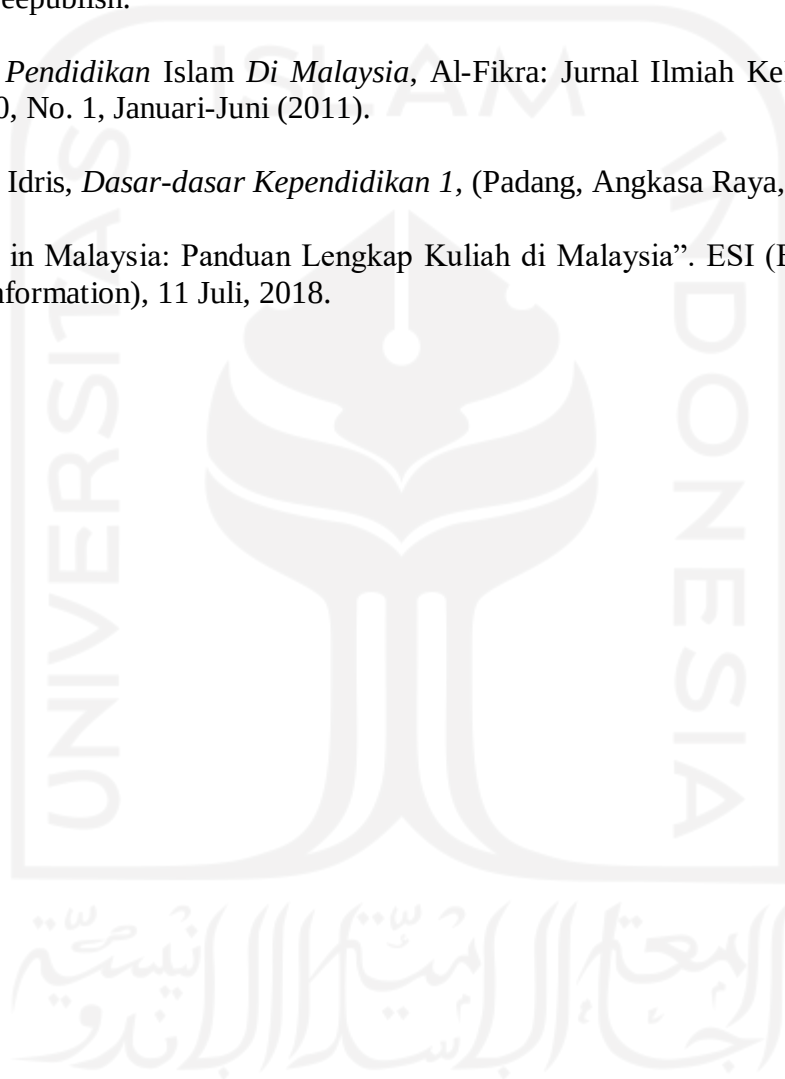
Wan Harun Bin W. Yaacob, “Pendidikan Guru Di Malaysia: Perkembangan dan Perubahan Kurikulum Ilmu Pendidikan Di Maktab Perguruan, Tahun 1957 Hingga 1986”, Universiti Sains Malaysia, 2008.

Wekke, Suyatno dan Ismail Suardi. 2018. Governance In Southeast Asia: Indonesia-Malaysia Perspective on Politics and Social Studies. Yogyakarta: Deepublish.

Zaitun, *Pendidikan Islam Di Malaysia*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni (2011).

Zahara, Idris, *Dasar-dasar Kependidikan 1*, (Padang, Angkasa Raya, 1987).

“Study in Malaysia: Panduan Lengkap Kuliah di Malaysia”. ESI (Egypt Student Information), 11 Juli, 2018.





LAMPIRAN



UNDANG-UNDANG MALAYSIA

CETAKAN SEMULA

Akta 550

AKTA PENDIDIKAN 1996

Sebagaimana pada 1 Januari 2012

DITERBITKAN OLEH

PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA

DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968

2012

AKTA PENDIDIKAN 1996

Tarikh Perkenan Diraja 15 Julai 1996

Tarikh

Kali terakhir dipinda melalui

Akta A1341 yang mula

berkuat kuasa pada 15 Jun 2009



UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 550

AKTA PENDIDIKAN 1996

SUSUNAN SEKSYEN

BAHAGIAN I PERMULAAN

Seksyen

1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran

BAHAGIAN II PENTADBIRAN

3. Pelantikan dan kewajipan Ketua Pengarah Pendidikan
4. Pengarah Pendidikan Negeri dan Pegawai Pendidikan lain
5. Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan dan Guru
6. Ketua Nazir Sekolah dan Nazir Sekolah
7. Pengarah Peperiksaan
8. Kuasa Menteri untuk mengeluarkan arahan am
9. Kuasa Menteri untuk mengeluarkan arahan khas 9A.

Perubahan nama

BAHAGIAN III

MAJLIS PENASIHAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN

10. Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan
11. Fungsi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan
12. Hak kehadiran
13. Kuasa untuk membuat peraturan berhubung dengan Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan
14. Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan boleh mengawal selia tatacaranya

sendiri

BAHAGIAN IV

SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Bab 1—Sistem Pendidikan Kebangsaan

15. Sistem Pendidikan Kebangsaan
16. Kategori institusi pendidikan
17. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama
18. Kurikulum Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua sekolah
19. Sekolah hendaklah menyediakan murid bagi peperiksaan yang ditetapkan

Bab 2—Pendidikan Prasekolah

20. Larangan terhadap penubuhan, pengendalian atau pengurusan tadika
21. Kuasa Menteri untuk menubuhkan tadika
22. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika
23. Bahasa pengantar di tadika
24. Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah
25. Bab 2 tidak terpakai bagi taman asuhan kanak-kanak
26. Ketidapkakaan seksyen 18 dan 19

Bab 3—Pendidikan Rendah

27. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan rendah
28. Penubuhan dan penyenggaraan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan
29. Tempoh pendidikan rendah 29_A.
Pendidikan rendah wajib

Bab 4—Pendidikan Menengah

Seksyen

30. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan menengah
31. Penubuhan dan penyenggaraan sekolah menengah
32. Kelas peralihan

Bab 5—Pendidikan Lepas Menengah

33. Pendidikan lepas menengah

Bab 6—Institusi Pendidikan Lain

34. Institusi pendidikan lain

Bab 7—Pendidikan Teknik dan Politeknik

35. Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain
36. Politeknik boleh menawarkan kursus pengajian dan menganugerahkan kelayakan yang diluluskan oleh Menteri
37. Kerjasama dengan institusi lain dan organisasi perindustrian dalam pendidikan teknik dan vokasional
38. Peruntukan tentang kursus pengajian berkenaan dengan ijazah yang diberikan oleh universiti, dsb.
39. Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan politeknik

Bab 8—Pendidikan Khas

40. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas
41. Kuasa untuk menetapkan tempoh dan kurikulum pendidikan khas

Bab 9—Pendidikan Guru

42. Sekatan terhadap penubuhan institut pendidikan guru
43. Pendaftaran institut pendidikan guru
44. Penganugerahan sijil atau kelayakan lain oleh institut pendidikan guru
45. Menteri boleh menubuhkan dan menyenggarakan institut

pendidikan guru

46. Institut pendidikan guru hendaklah mengendalikan kursus pengajian yang diluluskan oleh Menteri
47. Peruntukan tentang kursus pengajian berkenaan dengan ijazah, dsb. yang diberikan oleh universiti, dsb.
48. Surat cara pegelolaan bagi institut pendidikan guru
49. Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan institut pendidikan guru

Bab 10—Pengajaran Agama di Institusi Pendidikan

50. Pengajaran agama Islam
51. Pengajaran pengetahuan agama selain agama Islam
52. Bantuan kewangan kepada institusi pendidikan Islam yang tidak ditubuhkan atau disenggarakan oleh Menteri atau Kerajaan Negeri

Bab 11—Pengurusan Institusi Pendidikan

53. Surat cara pengelolaan bagi institusi pendidikan
54. Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan surat cara pengelolaan
55. Institusi pendidikan hendaklah diuruskan mengikut surat cara pengelolaannya
56. Kuasa Menteri untuk melantik pengelola tambahan
57. Pelantikan guru di bawah surat cara pengelolaan dan Akta
58. Kuasa Menteri berhubungan dengan penjalanan fungsi, dsb.
59. Pembubaran lembaga pengelola institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan
60. Notis pembubaran hendaklah mengandungi arahan berbangkit
61. Menteri hendaklah melantik lembaga yang lain apabila lembaga dibubarkan
62. Pembubaran lembaga pengurus atau lembaga pengelola institusi pendidikan kerajaan
63. Tafsiran

Bab 12—Penyediaan Kemudahan dan Perkhidmatan

64. Kuasa Menteri untuk memberikan bantuan
65. Pemeriksaan perubatan dan pergigian terhadap murid
66. Kemudahan penginapan

BAHAGIAN V PENILAIAN DAN

PEPERIKSAAN

67. Penilaian murid
68. Peperiksaan
69. Larangan tentang pengendalian peperiksaan

BAHAGIAN VI PENDIDIKAN

TINGGI

70. Menteri bertanggungjawab ke atas pendidikan tinggi
71. Penubuhan institusi pendidikan tinggi, dsb. dilarang
72. Penalti

BAHAGIAN VII INSTITUSI

PENDIDIKAN SWASTA

73. Kecualian berhubung dengan institusi pendidikan swasta
74. Institusi pendidikan swasta hendaklah mematuhi kehendak Kurikulum Kebangsaan dan menyediakan murid bagi peperiksaan yang ditetapkan
75. Mata pelajaran yang dikehendaki diajarkan di institusi pendidikan swasta yang menyediakan pendidikan lepas menengah
76. Kuasa untuk membuat peraturan bagi mengawasi dan mengawal taraf pendidikan
77. Larangan tentang kursus pengajian dan latihan berkenaan dengan ijazah, dsb. yang diberikan oleh universiti, dsb.
78. Pemakaian peruntukan lain dalam Akta bagi institusi pendidikan swasta

BAHAGIAN VIII PENDAFTARAN

INSTITUSI PENDIDIKAN

Bab 1—Pendaftaran Institusi Pendidikan

Seksyen

79. Semua institusi pendidikan hendaklah didaftarkan
80. Daftar
81. Perakuan pendaftaran sementara
82. Pendaftaran
83. Perubahan berkenaan dengan premis institusi pendidikan
84. Keengganan untuk mendaftarkan institusi pendidikan
85. Notis tentang keengganan untuk mendaftarkan institusi pendidikan
86. Larangan tentang pengiklanan, dsb.

Bab 2—Pembatalan Pendaftaran

87. Alasan bagi pembatalan pendaftaran institusi pendidikan

Bab 3—Pendaftaran Pengelola dan Pekerja

88. Semua pengelola dan pekerja hendaklah didaftarkan
89. Pendaftaran pengelola dan pekerja
90. Alasan bagi keengganan untuk mendaftarkan pengelola atau pekerja
91. Notis tentang keengganan untuk mendaftarkan pengelola atau pekerja
92. Rayuan terhadap keengganan untuk mendaftarkan pengelola atau pekerja
93. Kuasa Ketua Pendaftar untuk mengeluarkan pengelola atau pekerja daripada daftar
94. Persaraan pengelola dan pekerja
95. Orang yang dikeluarkan daripada daftar hendaklah diberitahu
96. Rayuan terhadap pengeluaran daripada daftar
97. Penyerahan balik perakuan pendaftaran

Bab 4—Pendaftaran Murid

98. Pendaftaran murid

Bab 5—Pemeriksaan Institusi Pendidikan oleh Ketua Pendaftar

Seksyen

99. Pemeriksaan hendaklah dibuat dari semasa ke semasa
100. Kuasa Ketua Pendaftar semasa memeriksa institusi pendidikan yang berdaftar
101. Pemeriksaan premis institusi pendidikan yang tidak berdaftar
102. Kuasa untuk menutup institusi pendidikan yang tidak berdaftar

BAHAGIAN IX PENDAFTARAN GURU

Bab 1—Pendaftaran Guru

103. Larangan mengajar
104. Daftar guru
105. Permohonan untuk didaftarkan sebagai guru
106. Kuasa Ketua Pendaftar untuk enggan mendaftarkan seseorang sebagai guru
107. Notis tentang keengganan untuk mendaftarkan seseorang sebagai guru
108. Rayuan terhadap keengganan untuk mendaftarkan seseorang sebagai guru
109. Pendaftaran guru
110. Pembatalan pendaftaran selepas diberikan notis
111. Rayuan
112. Pengeluaran daripada daftar
113. Peruntukan peralihan tentang pendaftaran guru

Bab 2—Permit Mengajar

114. Pengeluaran permit mengajar
115. Penyerahan balik perakuan pendaftaran sebagai guru
116. Kewajipan guru untuk memberitahu tentang pertukaran institusi pendidikan

BAHAGIAN X JEMAAH NAZIR

SEKOLAH

Bab 1—Jemaah Nazir

Seksyen

- 117. Kewajipan Ketua Nazir
- 118. Kuasa Nazir Sekolah untuk memberikan nasihat
- 119. Sekatan ke atas perintah Nazir Sekolah
- 120. Laporan Nazir Sekolah

Bab 2—Am

- 121. Kuasa am Nazir Sekolah
- 122. Ketua Nazir boleh memberi kuasa Pegawai Pendidikan untuk bertindak bagi pihaknya

BAHAGIAN XI KEWANGAN

- 123. Kecualian berhubungan dengan Menteri
- 124. Sumbangan bantuan dan sumbangan modal hendaklah tertakluk kepada syarat, dsb. yang ditetapkan
- 125. Kuasa Menteri untuk menggantung atau mengkansel pembayaran apa-apa sumbangan

BAHAGIAN XII RAYUAN

- 126. Menteri hendaklah memutuskan rayuan selepas penyiasatan
- 127. Kuasa Jawatankuasa Siasatan
- 128. Peguam bela dan peguam cara tidak boleh hadir di hadapan Jawatankuasa Siasatan
- 129. Keterangan di hadapan Jawatankuasa Siasatan

BAHAGIAN XIII PERATURAN-PERATURAN

Seksyen

- 130. Kuasa Menteri untuk membuat peraturan
- 131. Peraturan boleh menetapkan penalti kerana pelanggarannya

BAHAGIAN XIV KESALAHAN DAN PENALTI

132. Kesalahan dan penalti berhubungan dengan pendaftaran institusi
133. Kesalahan dan penalti berhubungan dengan pendaftaran guru
134. Kesalahan dan penalti berhubungan dengan pendaftaran Nazir
135. Penalti am
136. Kuasa untuk menyiasat
137. Kuasa untuk masuk tanpa waran
138. Memulakan dan menjalankan pendakwaan
139. Kuasa untuk mengkompaun kesalahan

BAHAGIAN XV PELBAGAI

140. Pegawai disifatkan sebagai pekhidmat awam
141. Kehendak tentang premis
142. Pendaftaran murid di institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan
143. Kuasa untuk mengecualikan institusi pendidikan
144. Jawatankuasa Khas
145. Penyampaian notis, dsb.

BAHAGIAN XVI PERALIHAN DAN

PEMANSUHAN

146. Pertukaran nama institusi pendidikan tertentu
147. Sekolah menengah vokasional hendaklah menjadi sebahagian daripada sekolah menengah kebangsaan sehingga dimansuhkan
Seksyen
148. Bantuan kepada institusi pendidikan yang sedia ada
149. Kecualian berkenaan dengan sumbangan untuk pengajaran agama
150. Kecualian berkenaan dengan institusi pendidikan terkecuali tertentu, dsb.
151. Kecualian berkenaan dengan institusi pendidikan, pengelola, pengurus atau pekerja berdaftar
152. Penggulungan Lembaga Pusat
153. Penyenggaraan kumpulan wang caruman
154. Sebutan mengenai pengelola atau lembaga pengelola hendaklah termasuk pengurus dan lembaga pengurus
155. Pemansuhan

156. Kuasa Menteri
Kewangan J_{ADUAL}

